



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Jl. Ir. Sutami No. 1, Sekupang, Batam Telp. (0778) 322734



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
TAHUN 2021 -2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah Yang Maha Esa atas rahmat dan berkah-Nya, sehingga Kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2021 - 2026. Penyusunan Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2021 – 2026 dalam rangka melaksanakan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan yang komperhensif sebagai pedoman dan arah bagi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam selama lima tahun kedepan.

Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air Kota Batam Tahun 2021 - 2026, disusun berpedoman serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Walikota Batam 2021 – 2026. Pada masa pandemi *covid 19* yang masih belum berakhir, pencapaian sasaran - sasaran pembangunan dibidang infrastruktur yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga dan Sumber Air Kota Batam perlu ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian Kota Batam dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Ucapan Terima Kasih Kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan Renstra Dinas ini. Semoga Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air Kota Batam Tahun Anggaran 2021 – 2026 dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan.

Batam, Desember 2021

**KEPALA DINAS BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM**



Ir. YUMASNUR, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630318 199402 1 002



DAFTAR ISI

KATA
PENGANTAR.....i
DAFTAR ISI.....ii
BAB. I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang1
1.2 Landasan Hukum4
1.3 Maksud dan Tujuan7
1.4 Sistematika Penyusunan8
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi10
2.2 Sumber Daya OPD.....12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....16
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah24
BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD...28
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah&Wakil Kepala Daerah
Terpilih.....34
3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi.....37
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KHLS).....42
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....45
BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI & KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan Sasaran.....49
BAB. V STRATEGI DAN KEBIJAKAN
5.1 Strategi dan Kebijakan.....51
BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....57
6.2 Indikator Kinerja Utama.....58
6.3 Kelompok Sasaran & Pendanaan Indikatif.....58
BAB. VII INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB. VIII PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Menurut Umur(Per Desember 2020).....	13
Tabel 2.2	Tabel Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Menurut Golongan (Per Desember 2020).....	13
Tabel 2.3	Tabel Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Menurut Tingkat Pendidikan (Per Desember 2020).....	13
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Menurut Jabatan (Per Desember 2020).....	14
Tabel 2.5	Tabel Sumber Daya Perangkat Perangkat Daerah.....	15
Tabel 2.6	Tabel Pembagian Ruas Jalan di Kota Batam.....	16
Tabel 2.7	Tabel Realisasi Indikator RPJMD Bidang Bina Marga Tahun 2016-2020....	17
Tabel 2.8	Tabel Realisasi Indikator RPJMD Bidang Sumber Daya Air tahun 2016-2020	19
Tabel 2.9	Tabel Realisasi Indikator RPJMD Bidang Penerangan Jalan Umum tahun 2011-2015	20
Tabel 2.10	Tabel Realisasi Indikator RPJMD Bidang Peralatan dan Pengujian tahun 2011-2015	21
Tabel 2.11	Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan PD 2016-2020 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	22
Tabel 2.12	Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	23
Tabel 3.1	Tabel Data 42 Titik Bajir di Kota Batam	33
Tabel 3.2	Tabel Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan PD.....	32
Tabel 3.3	Tabel Misi, tujuan dan sasaran, urusan dan program RPJMD yang terkait dengan Peran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam.....	36
Tabel 3.4	Tabel Target utama Kementerian PUPR 2020 – 2024	38
Tabel 3.5	Tabel telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau dan Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	41
Tabel 3.6	Tabel Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	43
Tabel 3.7	Tabel Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS).....	45
Tabel 3.8	Tabel Penentuan isu strategis	46
Tabel 3.9	Tabel Penentuan Nilai Skala Prioritas terhadap Isu – Isu Strategis.....	46
Tabel 3.10	Tabel Perkalian Isu Strategis Skala Prioritas Terhadap Bobot.....	47

Tabel 3.11	Tabel Aspek, Permasalahan dan Isu Strategis.....	48
Tabel 4.1	Tabel misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2021 – 2026 yang terkait dengan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	49
Tabel 4.2	Tabel Tujuan PD, Sasaran PD dan Indikator Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	50
Tabel 4.3	Tabel Target Kinerja Tujuan/Sasaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	50
Tabel 5.1	Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RPJMD Kota Batam 2021-2026 terkait Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam 2021-2026.....	51
Tabel 5.2	Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam 2021-2026.....	52
Tabel 5.3	Tabel Analisa SWOT.....	54
Tabel 6.1	Tabel Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Perangkat Daerah...	60
Tabel 7.1	Tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gambar Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional1

Gambar 1.2 Gambar Hubungan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....3

Gambar 1.3 Gambar Hubungan Renstra Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya Baik Tingkat Pusat Maupun Daerah3

Gambar 2.1 Gambar Kantor dan Workshop Dinas.....15

Gambar 2.2 Gambar Peralatan Pendukung Tupoksi Dinas16

Gambar 2.3 Gambar Ruas Jalan Kota Batam17

Gambar 2.4 Gambar Pembangunan Drainase Kota Batam.....19

Gambar 2.5 Gambar Lampu PJU Kota Batam.....20

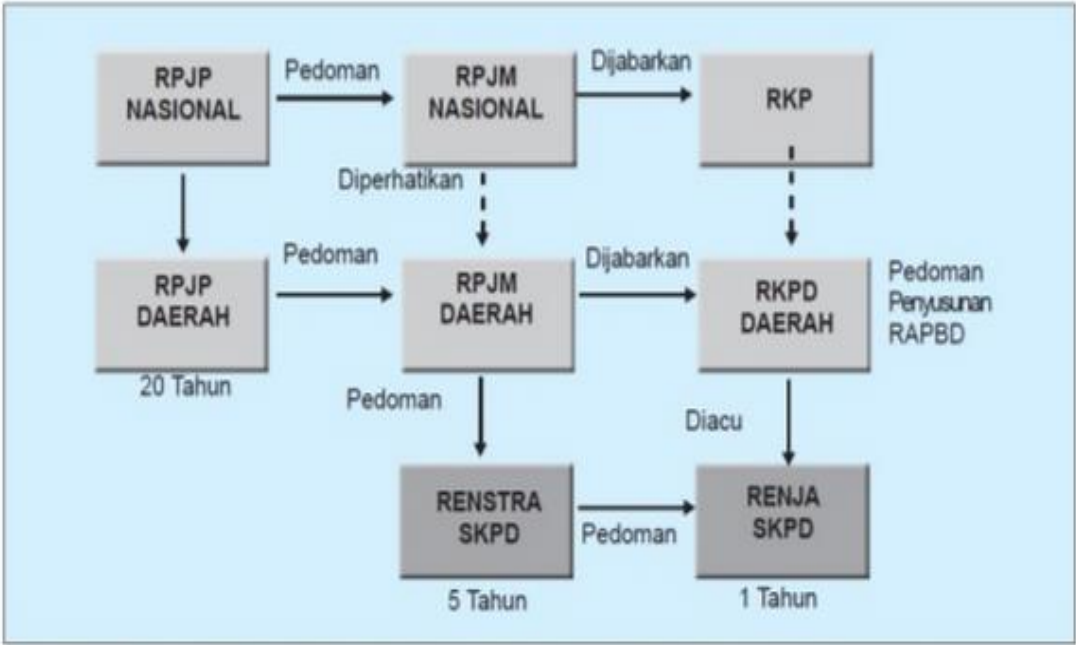
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk melaksanakan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka disusun perencanaan pembangunan daerah secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Batam 2021 – 2026 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan utama di Kota Batam. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan yang komprehensif berwawasan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2021 – 2026.

Gambar 1.1 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



Renstra Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam 2021 – 2026 memuat tujuan, strategi, kebijakan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kota Batam 2021 – 2026. Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam disusun dengan tahapan – tahapan sebagai berikut yaitu (1) tahap persiapan penyusunan, (2) penyusunan rancangan awal, (3) penyusunan rancangan, (3) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, (4) perumusan rancangan akhir dan (5) penetapan.

Berkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, maka Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2016-2021 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam. Sebagai sebuah organisasi yang bersifat dinamis senantiasa mengalami perubahan-perubahan yang terjadi pada waktu-waktu tertentu, maka seluruh aparatur Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam harus memiliki komitmen yang mengikat dalam perencanaan, yang bertujuan agar Pembangunan Infrastruktur dapat terlaksana sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan.

Komitmen dan koridor tersebut adalah visi yang jelas, lalu dijabarkan dalam beberapa misi. Selanjutnya berdasarkan misi yang telah dicetuskan, dilakukan kajian manajemen dalam bentuk identifikasi masalah dari kondisi yang ada, baik dari luar maupun dari dalam yang disusun dalam format analisis lingkungan internal dan eksternal dengan menghasilkan beberapa strategi atau kebijakan.

Renstra Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan program masing-masing Perangkat Daerah, berhubungan erat dengan RKPD, RPJMD dan RPJPD. Renstra Perangkat Daerah juga merupakan payung bagi dokumen perencanaan dibawahnya yaitu Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya akan menjadi rincian APBD.

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu Renstra perangkat daerah merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga Renstra perangkat daerah harus sinkron dan sinergi antar perangkat daerah yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Dalam hal kaitannya dengan sistem keuangan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka dengan berpedoman pada dokumen RPJMD

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang - Undang nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3078 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Batam nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam ;
32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021 - 2041;
33. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2021 – 2026;
34. Peraturan Walikota Batam nomor 40 tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam disusun berdasarkan Visi, Misi dan Program Strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, berkedudukan dan sekaligus berfungsi sebagai dokumen yang mengakomodir berbagai aspirasi yang ada di lingkungan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air baik bersumber dari masyarakat, dan juga *stakeholder* yang ada di Kota Batam untuk jangka waktu lima tahun.

Peyusunan Renstra Perubahan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dimaksudkan sebagai pedoman resmi perangkat daerah dalam menyusun arah kebijakan, strategi dan program-program pembangunan yang relevan dengan situasi, kondisi dan potensi yang ada di Kota Batam.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Renstra Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menyediakan suatu acuan bagi seluruh komponen di lingkungan Dinas dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;

2. Menyediakan suatu tolok ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan dinas;
3. Menjabarkan gambaran umum tentang kondisi infrastruktur urusan Pekerjaan Umum bidang bina marga dan sumber daya air yang ada di Kota Batam dan dalam rangka memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dengan mewujudkan visi dan misi dinas;
4. Memudahkan dalam penyusunan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dinas;
5. Memudahkan penilaian/pengukuran hasil program dan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah

1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

1.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, tugas pokok Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air adalah Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air daerah sesuai dengan kewenangannya.

2.1.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dipimpin oleh kepala Dinas yang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga, bidang sumber daya air, bidang peralatan dan pengujian dan bidang penerangan jalan umum;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bina marga, bidang sumber daya air, bidang peralatan dan pengujian dan bidang penerangan jalan umum;
- c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina marga, bidang sumber daya air, bidang peralatan dan pengujian dan bidang penerangan jalan umum; dan
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dinas.

2.1.3 Struktur Organisasi OPD

Dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2016 tersebut, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air disusun sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan program;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3) Sub Bagian Keuangan

- c. Bidang Bina Marga
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Jalan, Jembatan/Pelantar
 - 2) Seksi Jalan
 - 3) Seksi Jembatan dan Pelantar

- d. Bidang Prasarana Sumber Daya Air
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Prasarana Sumber Daya Air
 - 2) Seksi Drainase dan Sungai
 - 3) Seksi Pantai dan Waduk

- e. Bidang Peralatan dan pengujian
 - 1) Seksi Operasional Peralatan
 - 2) Seksi Pemeliharaan Peralatan
 - 3) Seksi Pengujian

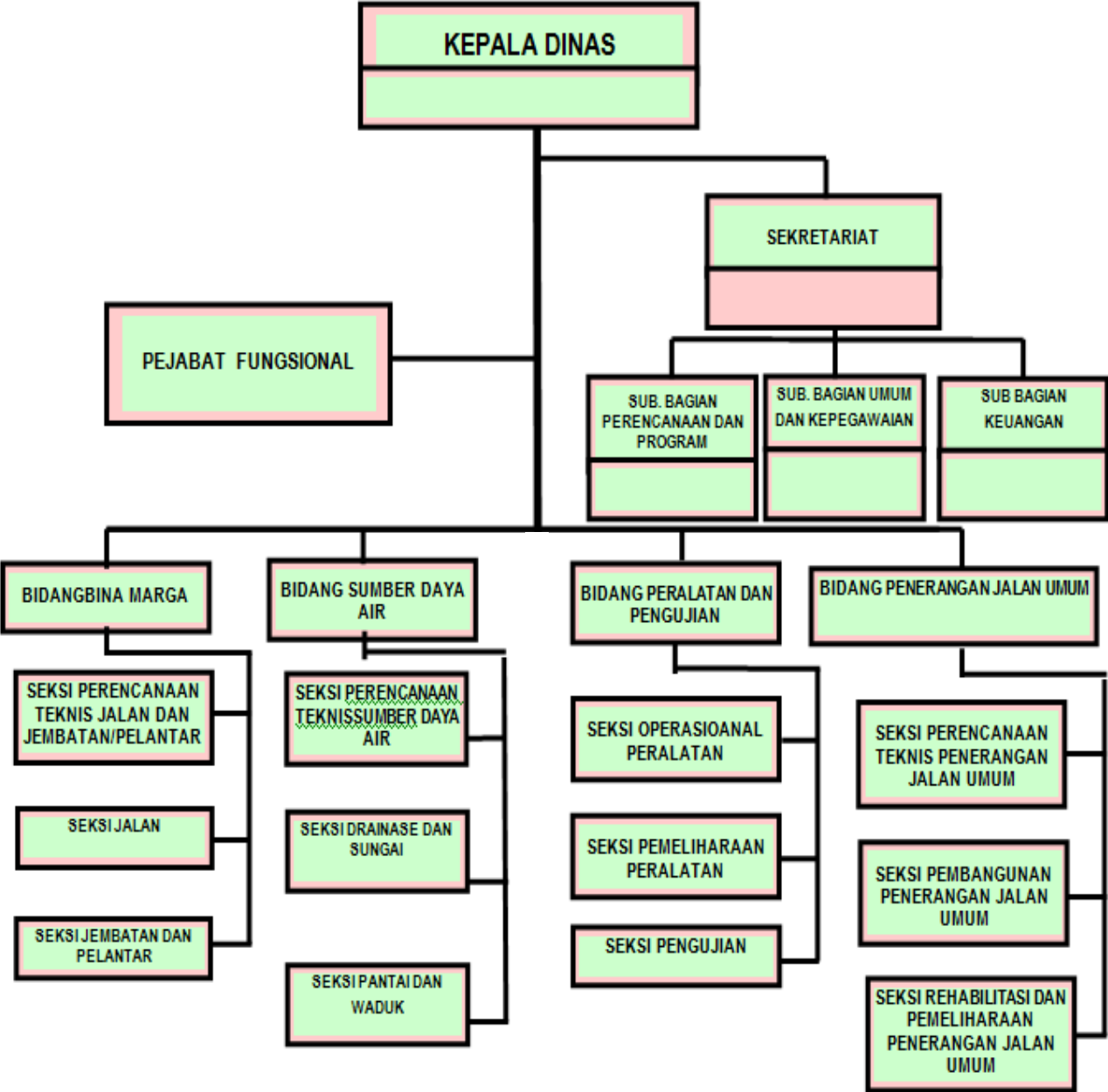
- f. Bidang Penerangan Jalan Umum
 - 1) Seksi Perencanaan teknis PJU
 - 2) Seksi Pembangunan PJU
 - 3) Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan PJU

- g. Unit Pelaksana Teknis

- h. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM



2.2 Sumber Daya OPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

2.2.1.1 Kepegawaian

Pegawai yang bertugas di lingkungan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Menurut Umur (Per Desember 2020)

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat			3	4	4	5	3	19
2	Bidang Binamarga		2	3	2	7	2	2	18
3	Bidang ALkal			1	2	4		3	10
4	Bidang SDA		2		1	4	2	1	10
5	Bidang Penerangan Jalan Umum				4	3		1	8
TOTAL			3	7	11	18	14	10	65

Sumber Daya Manusia yang didalam pemerintahan disebut dengan sumber daya aparatur, merupakan unsur penting dalam pelaksanaan manajemen organisasi pemerintah dan memegang peranan utama dalam menggerakkan dan menentukan keberhasilan organisasi pemerintah untuk mencapai target dan sasaran Dinas.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Menurut Golongan (Per Desember 2020)

No.	Unit Kerja	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat		7	11	1	19
2	Bidang Binamarga		4	13	1	18
3	Bidang ALkal		1	9		10
4	Bidang SDA	1	2	6	1	10
5	Bidang Penerangan Jalan Umum		1	7		8
TOTAL		1	15	46	3	65

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam sampai akhir tahun 2020 didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 65 (enam puluh lima) Pegawai Negeri Sipil (PNS). Latar belakang pendidikan PNS pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam didominasi oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan S1 sebanyak 33 orang.

**Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam
Menurut Tingkat Pendidikan (Per Desember 2020)**

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan					JUMLAH
		SD	SMA	Diploma	S1	S2	
1	Sekretariat		7	2	8	2	19
2	Bidang Binamarga		4	3	9	2	18
3	Bidang ALkal		2	2	6		10
4	Bidang SDA		2	2	5	1	10
5	Bidang Penerangan Jalan Umum		2		5	1	8
TOTAL			17	9	33	6	65

2.2.1.2 Jabatan Struktural

Kondisi Pegawai menurut jabatan di Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dapat dilihat padaTabel berikut.

**Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam
Menurut Jabatan (Per Desember 2020)**

No.	Jabatan	JUMLAH
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	14
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	-
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	46
TOTAL		65

Berdasarkan data SDM aparatur Dinas dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas fungsi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Kota Batam secara umum masih kurang, secara kuantitas dan kualitas. Untuk itu penambahan pegawai serta peningkatan kemampuan, kompetensi dan kapasitas sumber daya aparatur dalam bidang infrastruktur pekerjaan umum sangat diperlukan dalam rangka untuk peningkatan kinerja dinas.

2.2.2 Sarana Dan Prasarana

Dalam rangka melaksanakan tugas, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Saat ini Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam mengelola beberapa sarana yaitu :

2.1 Gambar Kantor dan Workshop Dinas

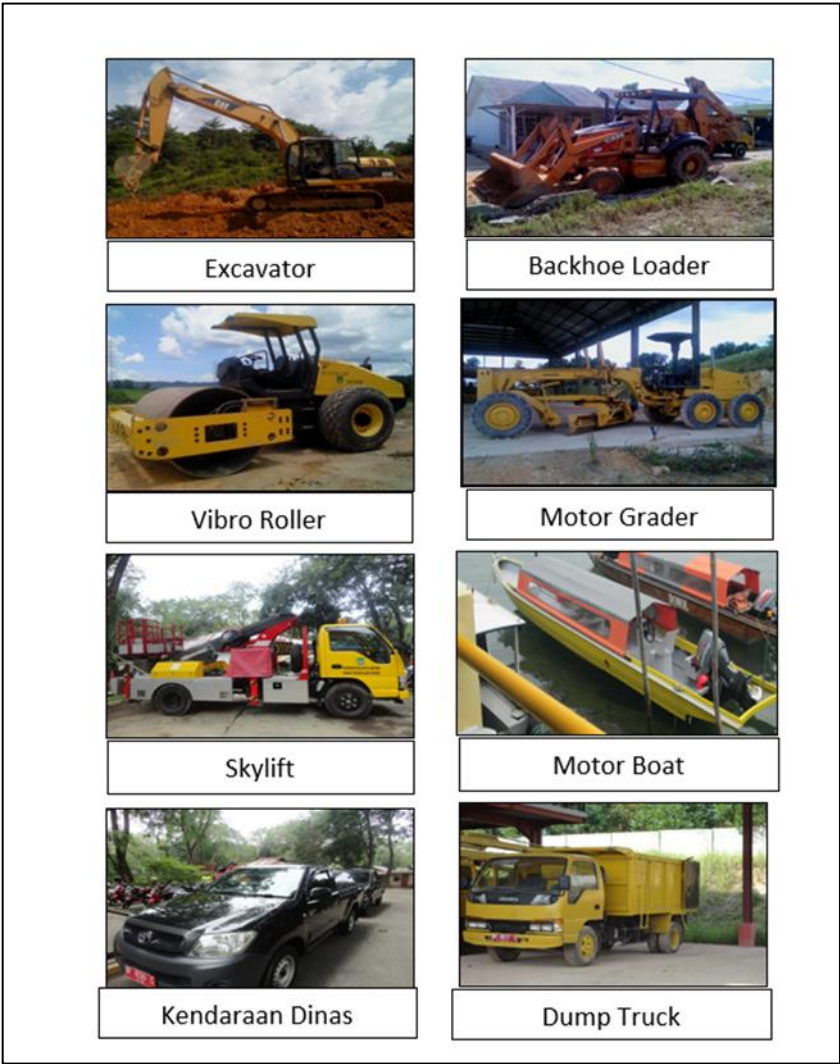


Adapun Kondisi Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dna Sumbnr Daya Air Kota Batamuntuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5 Sumber Daya Perangkat Perangkat Daerah

NO	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Satuan	Kondisi		Keterangan
				Baik	Rusak Berat	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	16,826	(M²)	V		
2	Bangunan Gedung Kantor	2	unit	V		
3	Alat Berat	35	unit	V		
4	MEUBELAIR	254	unit	V		
5	Kendaraan Roda 4	18	unit	V		
6	Kendaraan Roda 4	1	unit		V	
7	A.C (Pendingin Ruangan)	67	unit	V		
8	Komputer	77	Unit	V		
9	Printer	53	Unit	V		

Gambar 2.2 Peralatan Pendukung Tupoksi Dinas



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di Kota Batam mengakibatkan tuntutan terhadap sarana dan prasarana semakin meningkat pula kebutuhan terhadap prasarana jalan, jembatan/pelantar, drainase, dan penerangan jalan umum.

2.3.1 Bidang Bina Marga

Dalam bidang infrastruktur jalan, pembagian ruas jalan yang ada di Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6 Pembagian Ruas Jalan di Kota Batam

Ruas Jalan	Panjang
Ruas Jalan Nasional	160,20 KM
Ruas Jalan Provinsi	112,35 KM
Ruas Jalan Kota	646,16 KM

Ruas Jalan diatas belum termasuk jalan yang dibangun oleh pihak Developer.

Gambar 2.3 Gambar Ruas Jalan Kota Batam



Tabel 2.7 Realisasi Indikator RPJMD Bidang Bina Marga Tahun 2016-2020

INDIKATOR RPJMD	SATUAN	REALISASI INDIKATOR RPJMD				
		2016	2017	2018	2019	2020
Panjang ruas jalan yang dibangun/ ditingkatkan	km	31,4	34,4	28,12	25,59	4,91
Panjang Jembatan/ Pelantar Yang Dibangun	m	15	36	12	31	-
Panjang jalan yang dipelihara	km	35	35	40	48	48
Panjang jalan yang dibangun/ ditingkatkan di wilayah hinterland	km	1	3,1	3	3,3	-
Panjang jembatan/ pelantar yang dibangun di wilayah hinterland	m	250	276,2	250	264	-

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2014, tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sub Bidang Bina Marga/ Jalan untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan indikator prosentase tingkat kondisi jalan kabupaten/Kota dalam kondisi mantap sampai dengan 2019 adalah 60 persen. Terhadap target tersebut untuk urusan bidang PUPR sub bidang Bina Marga/Jalan telah mencapai target SPM yang ditetapkan, yaitu

sampai dengan tahun 2019 kondisi jalan Kota baik dan sedang sudah mencapai 85,39 persen.

Indikator Panjang Jalan yang dibangun/ditingkatkan (km) selama periode 2016 sampai dengan 2020 telah menunjukkan realisasi yang positif. Adapun pencapaian sampai dengan tahun 2020 total panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan adalah sepanjang 124 Km dengan pencapaian sebesar 70 persen terhadap kebutuhan panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan pada periode RPJMD 2016-2021. Lebih lanjut, pencapaian target tahunan sejak 2016-2018 selalu tercapai, hanya pada tahun 2019 target 30 Km hanya terealisasi 25,59 Km. Hal tersebut dikarenakan pembangunan jalan yang dilakukan tidak hanya menambah panjang jalan tapi juga lebar jalan untuk mengurangi kemacetan, dengan volume 4,41 Km.

Sebagai dampak dari terjadinya bencana non alam yang tidak hanya terjadi di Kota Batam namun, terjadi hampir diseluruh Negara di dunia yang berupa *Covid-19A*, maka dilakukan Penyesuaian anggaran TA.2020 yang dilakukan dengan *Refocusing*, rasionalisasi serta prioritas anggaran pada masing - masing Perangkat Daerah, sehingga berpengaruh pada pencapaian kinerja bidang bina marga pada tahun 2020 yang berfokus pada menjaga kondisi jalan tetap dalam kondisi baik dengan melakukan pemeliharaan jalan sepanjang 48 km dan peningkatan/pembangunan jalan sepanjang 4,91 km melalui dana DAK.



Untuk Indikator Program Panjang Jembatan/ Pelantar yang dibangun (m) selama periode RPJMD 2016-2021 mencapai realisasi yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dengan kebutuhan total panjang jembatan/pelantar yang dibangun pada periode RPJMD 2016-2021 adalah sepanjang 60 m, kemudian sudah terealisasi sampai dengan tahun 2020 sepanjang 94 m atau dengan tingkat pencapaian sebesar 156

persen terhadap kebutuhan total panjang jembatan/pelantar yang dibangun pada periode RPJMD 2016-2021. Pencapaian Indikator Program Panjang Jembatan/ Pelantar yang dibangun tiap tahunnya rata – rata telah melebihi target yang ditetapkan. Untuk indikator Panjang Jalan yang dipelihara (Km)



dengan total Panjang Ruas Jalan Kota Batam yang harus dipelihara sepanjang 646,16 Km, selama periode 2016-2020 pemeliharaan jalan telah terealisasi sesuai target yang ditetapkan tiap tahunnya.



Untuk pembangunan infrastruktur pada daerah hinterland terdiri dari beberapa indikator yaitu, Indikator Program Panjang jalan yang dibangun / ditingkatkan di wilayah hinterland (Km) selama periode 2016-2021 telah mencapai realisasi yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari kebutuhan total Panjang jalan yang dibangun/ ditingkatkan di wilayah hinterland (Km) selama periode 2016-2021 adalah sepanjang 11 Km. Adapun realisasi sampai dengan tahun 2020 adalah sepanjang 10 Km dengan pencapaian 95 persen terhadap kebutuhan pembangunan/peningkatan jalan wilayah *hinterland* pada periode RPJMD 2016-2021. Indikator Program Panjang Jembatan/ Pelantar yang dibangun (m) di wilayah hinterland selama periode 2016-2021, Hal ini dapat dilihat dari kebutuhan total Panjang Jembatan/ Pelantar yang dibangun (m) di wilayah hinterland adalah sepanjang 1500 m, adapun realisasi sampai dengan tahun 2019 adalah sepanjang 1.040 m dengan pencapaian 70 persen terhadap kebutuhan total Panjang Jembatan/ Pelantar yang dibangun (m) di wilayah hinterland.

2.3.2 Bidang Sumber Daya Air

Gambar 2.4 Pembangunan Drainase Kota Batam



Permasalahan banjir di Kota Batam secara umum disebabkan infrastruktur drainase yang ada di wilayah perkotaan sebagian besar sudah tidak mampu lagi mengalirkan debit air yang cukup besar yang disebabkan sebagian dimensi saluran sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Kota Batam saat ini dikarenakan perubahan tata guna lahan secara cepat yang tidak bisa diimbangi dengan penyediaan infrastruktur drainase kota. Selain itu masih banyak saluran/drainase alami yang belum tertata dengan baik sehingga tingkat sedimentasi menjadi tinggi dan juga perilaku masyarakat yang sering

membuang sampah pada drainase. Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam melalui Program Pengendalian Banjir dan Perbaikan Jaringan Pengairan selama periode RPJMD 2016-2021 sepanjang 22.000 m, kemudian sudah terealisasi sampai dengan tahun 2019 sepanjang 29.489 m atau dengan tingkat pencapaian sebesar 134 persen terhadap kebutuhan total panjang drainase yang dibangun pada periode RPJMD 2016-2021. Selain itu Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam telah melakukan pemeliharaan drainase setiap tahunnya. Untuk daerah hinterland dalam rangka mengatasi daya rusak air laut atau abrasi maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam telah melakukan kegiatan pembangunan tebing pantai pada lokasi tersebut. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 telah terbangun sepanjang sepanjang 523 meter.

Tabel 2.8 Realisasi Indikator RPJMD Bidang Sumber Daya Air tahun 2016-2020

INDIKATOR RPJMD	REALISASI INDIKATOR RPJMD					
	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang saluran drainase yang dibangun/ditingkatkan	m	7545	5844	10700	5400	-
Panjang saluran drainase yang dipelihara	m	45.000	45000	48000	50000	52000
Panjang lokasi abrasi yang ditangani	m	-	100	333	90,2	-

2.3.1 Bidang Penerangan jalan Umum

Adapun untuk Indikator Program jumlah titik lampu (PJU) yang dibangun, selama periode 2016-2019 telah menunjukkan realisasi yang positif. Secara total kebutuhan jumlah titik lampu (PJU) yang dibangun, selama pada periode RPJMD



2016-2021 adalah sebanyak 1.527 titik, adapun pencapaian sampai dengan tahun 2019 total jumlah titik lampu (PJU) yang dibangun adalah sebanyak 1.157 titik, atau dengan pencapaian terhadap kebutuhan sebesar 75,77 persen terhadap kebutuhan jumlah titik lampu (PJU) yang dibangun selama pada periode RPJMD

2016-2021. Selanjutnya Selama periode 2016-2019 seluruh Jumlah Titik Lampu yang dipelihara di Kota Batam telah terealisasi sesuai target. Pada Indikator jaringan lampu PJU yang direhabilitasi pada periode RPJMD 2016- 2021 kebutuhannya

adalah sepanjang 114.300 meter, sampai dengan tahun 2019 terealisasi sepanjang 62.800 m atau dengan pencapaian 54,94 terhadap target RPJMD 2016-2021. Untuk indikator Jumlah Titik Lampu PJU yang dibangun di wilayah hinterland dengan kebutuhan pada periode RPJMD 2016-2021 adalah sebesar 168 titik, sedangkan realisasi sampai dengan tahun 2019 sebanyak 68 titik atau dengan pencapaian 40,48 persen. Pembangunan lampu PJU di wilayah hinterland belum dapat terpenuhi sesuai target dikarenakan Keterbatasan Daya PLN pada daerah *hinterland*. Untuk Indikator Jumlah Titik Lampu PJU yang Dipelihara di wilayah hinterland telah terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan tiap tahunnya.

Tabel 2.9 Realisasi Indikator RPJMD Bidang Penerangan Jalan Umum tahun 2016-2020

INDIKATOR RPJMD	SATUAN	REALISASI INDIKATOR RPJMD				
		2016	2017	2018	2019	2020
Terbangunnya lampu PJU	titik	227	295	288	407	-
Terpeliharanya lampu PJU	titik	11348	11727	12247	12475	12475
Panjang jaringan lampu PJU yang direhabilitasi	m	14300	20000	15000	13500	-

2.3.1 Bidang Peralatan dan Pengujian

Bidang Peralatan dan Pengujian sebagai menunjang tugas ke Bina Margaan dan Sumber Daya Air memiliki dua indikator program yaitu indikator Jumlah Peralatan dan Alat Berat dan Jumlah Peralatan dan Alat Berat Yang Dipelihara dengan pencapaian sebagai berikut.

Tabel 2.10 Realisasi Indikator RPJMD Bidang Peralatan Pengujian tahun 2016-2020

INDIKATOR RPJMD	SATUAN	REALISASI INDIKATOR RPJMD				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Peralatan dan Alat Berat	unit	1	10	4	0	1
Jumlah Peralatan dan Alat Berat Yang Dipelihara	unit	17	28	32	32	33

Untuk melihat pencapaian kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD 2016-2020 Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kota Batam

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM/IKK	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	Panjang ruas jalan yang dibangun/ditingkatkan		25 Km	25 Km	28 Km	30 Km	33 Km	31.4 Km	34.4 km	28.12 km	25.59 km	4.91 km	1.26	1.38	1.00	0.85	0.15
4	Panjang Jembatan/ Pelantar Yang Dibangun		10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	15 m	36 m	12 m	31 m	-	1.50	3.60	1.20	3.10	-
5	Panjang jalan yang dipelihara		35 Km	35 Km	40 Km	48 Km	53 Km	35 Km	35 Km	40 Km	48 Km	48 Km	1.00	1.00	1.00	1.00	0.91
6	Tersedianya Perencanaan Teknis dan Sinkronisasi Jalan, Jembatan/Pelantar Kota Batam		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	20 Dokumen	15 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	7 Dokumen	1.67	1.25	1.00	0.75	0.58
7	Jumlah Titik Lampu PJU Yang Dipelihara		11348 titik	11727 titik	12022 titik	12475 titik	12767 titik	11348 titik	11727 titik	12247 titik	12475 titik	12735 titik	1.00	1.00	1.02	1.00	1.00
8	Jumlah Titik Lampu PJU yang Dibangun		227 titik	260 titik	260 titik	260 titik	260 titik	227 titik	295 titik	228 titik	407 titik	-	1.00	1.13	0.88	1.57	-
9	Panjang jaringan lampu PJU yang direhabilitasi		-	20000 m	20000 m	20000 m	20000 m	-	20000 m	15000 m	13500 m	-	-	1.00	0.75	0.68	-
10	Jumlah Peralatan dan Alat Berat		1 unit	6 unit	4 unit	4 unit	3 unit	1 unit	10 unit	4 unit	-	-	1.00	1.67	1.00	-	-
11	Jumlah Peralatan dan Alat Berat Yang Dipelihara		17 unit	28 unit	32 unit	32 unit	32 unit	17 unit	28 unit	32 unit	32 unit	33 unit	1.00	1.00	1.00	1.00	1.03
12	Tersedianya Perencanaan Teknis PJU Kota Batam		7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	1.00	1.14	1.00	0.86	0.43
13	Panjang drainase yang dibangun/ ditingkatkan		3000 m	3000 m	3000 m	4000 m	4000 m	7545 m	5844 m	10700 m	5400 m	-	2.52	1.95	3.57	1.35	-
14	Panjang drainase yang dipelihara		45000 m	45000 m	45000 m	50000 m	52000 m	45000 m	45000 m	48000 m	50000 m	50000 m	1.00	1.00	1.07	1.00	0.96
15	Panjang lokasi abrasi pantai yang ditangani		-	100 m	150 m	200 m	250 m	-	100 m	333 m	90.2 m	-	-	1.00	2.22	0.45	-
16	Tersedianya Perencanaan Teknis dan Sinkronisasi Drainase dan Tebing Pantai Kota Batam		10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	18 Dokumen	14 Dokumen	10 Dokumen	6 Dokumen	1.00	1.80	1.40	1.00	0.60
17	Panjang jalan yang dibangun/ ditingkatkan di wilayah hinterland		1 Km	2 Km	2 Km	2 Km	2 Km	1 Km	3.1 Km	3 Km	3.3 Km	-	1.00	1.55	1.50	1.65	-
18	Panjang jembatan/ pelantar yang dibangun di wilayah hinterland		250 m	250 m	250 m	250 m	250 m	250 m	276.2 m	250 m	264 m	-	1.00	1.10	1.00	1.06	-
19	Jumlah Titik Lampu PJU yang Dipelihara di wilayah hinterland		379 titik	397 titik	447 titik	447 titik	465 titik	379 titik	397 titik	447 titik	447 titik	465 titik	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
20	Jumlah Titik Lampu PJU yang Dibangun di wilayah hinterland		18 titik	30 titik	30 titik	30 titik	30 titik	18 titik	50 titik	-	-	-	1.00	1.67	-	-	-

Tabel 2.12. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas BinaMarga dan Sumber Daya Air-Kota Batam

Uraian *)	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-								Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2020	2020	Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(16)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	23,298,798,830.12	24,285,244,401.16	23,204,572,434.72	23,275,466,286.00	23,372,537,090.00	23,372,537,090.00	22,142,259,083.00	23,112,552,519.00	22,574,849,120.00	22,704,764,523.00	22,974,853,062.00	22,974,853,062.00	95%	95%	97%	98%	98%	98%	98%	98%	23,487,323,808.40	22,701,855,661.40
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,801,035,153.00	2,047,271,675.90	1,505,073,960.00	556,260,870.00	355,747,500.00	355,747,500.00	2,726,879,209.00	2,010,757,445.00	1,494,064,250.00	545,795,809.00	338,162,540.00	338,162,540.00	97%	98%	99%	98%	95%	95%	95%	95%	1,463,077,831.78	1,423,131,850.80
Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jalan dan JembatanPekantar	155,999,011,026.72	212,263,746,698.95	217,753,676,106.89	197,376,990,221.20	47,236,833,479.00	47,236,833,479.00	149,763,172,331.68	160,985,817,554.00	187,063,058,532.00	169,083,976,067.00	44,888,643,761.00	44,888,643,761.00	96%	96%	86%	86%	95%	95%	95%	95%	168,126,051,506.55	142,352,933,649.14
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana KebinaMargaan	22,578,138,393.97	36,770,184,464.75	29,720,455,560.00	33,472,381,882.00	20,871,571,695.00	20,871,571,695.00	21,738,424,205.00	32,297,006,914.00	27,281,043,379.00	22,685,918,860.00	20,031,481,589.00	20,031,481,589.00	96%	88%	92%	69%	96%	96%	96%	96%	28,882,548,389.14	24,803,774,989.40
Pengendalian Banjir dan Perbaikan Jaringan Pengaliran	26,987,859,502.20	38,878,001,851.00	35,949,633,932.00	31,184,039,084.00	13,184,160,316.00	13,184,160,316.00	25,709,214,399.75	29,448,156,829.00	33,747,996,826.00	18,226,743,956.00	12,894,849,150.00	12,894,849,150.00	95%	76%	94%	59%	98%	98%	98%	98%	28,236,738,937.04	24,005,392,232.15
Program Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Hinterland	-	15,691,043,406.25	9,982,778,328.00	7,387,462,630.00	2,466,008,626.50	2,466,008,626.50	-	11,243,440,313.00	7,662,864,261	4,139,228,931.00	2,363,324,386.00	2,363,324,386.00	-	72%	77%	56%	96%	96%	96%	96%	7,105,458,638.15	5,081,771,578.20
	231,664,842,906.01	329,835,492,498.01	318,116,190,321.61	293,252,600,973.20	107,486,858,906.50	107,486,858,906.50	222,079,949,228.43	259,097,731,574.00	279,823,876,368.00	237,386,428,146.00	103,471,314,488.00	103,471,314,488.00	96%	79%	88%	81%	96%	96%	96%	96%	248,985,738,483	215,290,088,383

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dampak dari pandemi *covid 19* membuat perlambatan pada pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun Kota Batam, sehingga diperlukan faktor – faktor penggerak untuk kembali menggerakkan sektor ekonomi di kota Batam salah satunya adalah dengan penyediaan infrastruktur fisik yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting dalam menggerakkan roda perekonomian sekaligus sebagai penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, disamping peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah dan efisiensi usaha. Dengan demikian tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan dengan kondisi semakin baik dalam rangka mewujudkan infrastruktur Kota Batam yang modern.

Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk namun belum disertai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang layak dan memadai, akan memunculkan berbagai permasalahan pada masyarakat seperti kemacetan lalu lintas, banjir dan lainnya. Selain itu, kesediaan infrastruktur masih belum merata antara pembangunan mainland dan hinterland.

Adapun dari sisi koordinasi antar instansi yang juga tidak kalah penting dalam pembangunan infrastruktur oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam. Kondisi saat ini masih dirasakan belum berjalan secara optimal, walaupun dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan koordinasi dalam sektor pembangunan dengan instansi terkait. Koordinasi perlu ditingkatkan lagi kedepannya sehingga akan memacu dan memaksimalkan pembangunan infrastruktur di Kota Batam. Selain itu juga dimensi penyelenggaraan infrastruktur yang berkelanjutan termasuk aspek pemanfaatan teknologi dan aspek pengelolaan yang memperhitungkan resiko kegagalan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan prima bagi masyarakat juga perlu mendapat perhatian.

Untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka dibutuhkan peningkatan kompetensi dan keahlian terutama bidang teknis dan administrasi pemerintahan. Hal ini merupakan hal penting yang harus dipenuhi kedepannya. Dengan adanya peningkatan kompetensi dan keahlian tersebut diharapkan pelayanan dan kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam akan lebih optimal untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai target dan sasaran dinas dan pelayanan kepada masyarakat kedepannya.

Tantangan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum ke depan juga erat terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3 (tiga) pilar pembangunan (ekonomi, sosial dan lingkungan) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Tantangan

pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana pembangunan fisik, sosial dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan (menjaga kawasan dan lingkungan hunian agar tetap aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan).

Tantangan umum lainnya yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, khususnya bidang pekerjaan umum adalah belum tersedianya dana yang cukup dan keterbatasan lahan untuk pembangunan infrastruktur yang menyebabkan terhambatnya kelancaran pembangunan infrastruktur. Untuk mengatasi hal ini Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam selain terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, juga mengusulkan peningkatan anggaran untuk bidang infrastruktur yang tidak hanya melalui anggaran APBD Kota juga ditambah melalui dana APBD Provinsi dan APBN yang dalam beberapa tahun ini relatif meningkat setiap tahunnya.

Format pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas yang berwawasan lingkungan dengan infrastruktur perkotaan yang modern serta penataan permukiman yang ramah, asri, dan nyaman. Selain itu untuk pemerataan pembangunan juga perlu melakukan percepatan pembangunan wilayah kepulauan sebagai penopang perekonomian Kota Batam Untuk mendukung itu maka diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi serta perlunya memperkuat koordinasi antar instansi dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat terkait penanganan infrastruktur di Kota Batam. Dengan demikian infrastruktur dapat berperan dalam menggerakkan dan mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kenyamanan lingkungan bagi masyarakat, sehingga dapat mencapai visi Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang berdaya saing, maju, sejahtera dan bermartabat.

Tantangan khusus pembangunan di bidang Bina Marga:

- 1) Pemenuhan peningkatan jalan kondisi mantap;
- 2) Melakukan antisipasi terhadap pertumbuhan prosentase kendaraan yang akan terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan kota dan ekonomi masyarakat dengan penyediaan Prasarana Jalan dan Jembatan/Pelantar yang memadai.
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
- 4) Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.

- 5) Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi kebutuhan aksesibilitas.

Tantangan khusus pembangunan di bidang Sumber Daya Air :

- 1) Melakukan upaya dan langkah pengendalian banjir dalam rangka menangani titik banjir.
- 2) Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir dan abrasi pantai.
- 3) Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari hulu terkecil hingga hilir.
- 4) Merencanakan keberlanjutan daya dukung SDA, baik untuk air permukaan maupun air tanah terutama didaerah hinterland.

Tantangan khusus pembangunan di bidang Penerangan Jalan Umum :

- 1) Pemenuhan kebutuhan prasarana lampu penerangan jalan umum sesuai spesifikasi penerangan jalan di kawasan perkotaan, sehingga dihasilkan penerangan yang dapat memberikan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan bagi pengguna jalan, khususnya di malam hari.
- 2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan jaringan lampu PJU dan meminimalkan padamnya Lampu PJU di malam hari.
- 3) Pemenuhan kebutuhan prasarana Penerangan Jalan Umum yang mendukung sarana perkotaan yang memenuhi standar dan kualitas dalam menunjang sektor riil dan pariwisata.
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat lampu jalan dalam memanfaatkan lampu jalan yang tersedia.
- 5) Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan lampu jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap lampu jalan yang ada.
- 6) Mempertahankan peran dan fungsi prasarana lampu jalan sebagai pendorong dalam pengembangan wilayah dalam memenuhi kebutuhan penerangan jalan.

Tantangan khusus pembangunan di bidang Peralatan dan Pegujian:

- 1) Ketersediaan peralatan sesuai kebutuhan serta didukung pemeliharaannya sehingga kondisinya selalu siap pakai untuk kebutuhan pelayanan bidang bina margadan sumber daya air.
- 2) Ketersediaan sarana dan prasarana pengujian serta sumber daya manusia pendukungnya.

Dalam menghadapi tantangan umum maupun khusus indentifikasi peluang-peluang yang ada pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam antara lain:

1. Ditetapkannya Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas maka diharapkan alokasi pembangunan dalam bidang infrastruktur dengan menggunakan APBN maupun APBD provinsi akan meningkat di Kota Batam.
2. Selain itu dengan Kota Batam masuk kedalam lokasi prioritas pengembangan kawasan perbatasan di wilayah perbatasan maka diharapkan percepatan pembangunan khususnya bidang infrastruktur akan semakin meningkat.
3. Semakin meningkatnya anggaran untuk bidang infrasruktur pada APBD Kota Batam, hal ini dapat dilihat dari peningkatan alokasi anggaran untuk urusan pekerjaan umum dalam lima tahun terakhir.
4. Adanya upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya bidang bina marga dan sumber daya air.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PD

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi di Batam mengakibatkan kebutuhan terhadap infrastruktur semakin meningkat, baik kebutuhan terhadap infrastruktur jalan, dan drainase maupun prasarana dasar lainnya. Pertumbuhan penduduk yang pesat tersebut harus diimbangi dengan laju pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi adalah dengan memperlancar arus lalu lintas barang, jasa dan orang, sehingga peran jaringan prasarana jalan, sistem drainase yang baik dan prasarana dasar lainnya yang memadai menjadi semakin penting.

Seluruh kegiatan tersebut tentunya harus dikelola secara bijaksana, tepat dan benar, baik dari manajemen perkotaannya maupun penyiapan sarana dan prasarana pendukungnya. Jika hal tersebut tidak direncanakan dengan lebih baik, maka masyarakat terutama yang bekerja di sektor non formal biasanya akan memanfaatkan tempat-tempat strategis di perkotaan untuk pedagang K5/sejenisnya, dan tumbuhnya permukiman bermasalah pada daerah aliran sungai (DAS) maupun tempat-tempat lain.

Secara legal di dalam perkembangan perkotaan Kota Batam masih terjadi ketidak konsistennya penerapan tata ruang yang ada dengan pelaksanaan di lapangan, seperti misalnya adanya pembukaan lahan-lahan besar untuk berbagai kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi lahan yang telah ditetapkan dalam RTRW. Konsekuensinya adalah terjadinya revisi tata ruang, perubahan tata guna lahan, yang akhirnya berdampak kepada infrastruktur perkotaan. Salah satu dampak negatif dari hal tersebut yaitu menyebabkan kurangnya kawaasan resapan air hujan sehingga menyebabkan terjadinya banjir serta rusaknya jaringan jalan.

Demikian juga halnya dengan daerah *hinterland*, daerah tersebut selama ini pertumbuhan ekonominya jauh tertinggal bila dibandingkan dengan Kota Batam. Hal ini terjadi karena daerah tersebut merupakan daerah terisolir dengan ketersediaan infrastruktur yang masih terbatas seperti jaringan jalan, dan jembatan, serta kawasan pantai mengalami kerusakan terutama pada kawasan padat permukiman penduduk. Dengan dibangunnya prasarana jalan dan jembatan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut semakin meningkat sehingga pada daerah sekitar akan tumbuh pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan membuka akses kegiatan masyarakat.

Beberapa permasalahan khusus wilayah perkotaan Kota Batam adalah menurunnya fungsi (daya dukung lingkungan) kawasan perkotaan yang merupakan dampak dari

pesatnya pembangunan yang dilakukan baik oleh pihak swasta maupun pemerintah, sementara prasarana perkotaan seperti jalan, drainase, prasarana pemukiman lainnya belum dapat memenuhi kebutuhan seperti yang diharapkan.

Beberapa permasalahan tersebut antara lain :

I. Permasalahan dalam Bina Marga

a. Bidang Bina Marga

Dengan ditetapkan beberapa ruas jalan arteri 17 (tujuh belas) ruas menjadi Ruas Jalan Nasional yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan 25 (dua puluh lima) ruas jalan ditetapkan menjadi Ruas Jalan Provinsi yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, maka untuk ruas-ruas jalan yang sudah punya status pengelolaan tersebut kedepan pengelolaannya diharapkan melalui dana APBN dan APBD Provinsi, sementara untuk beberapa ruas jalan lainnya termasuk ruas jalan yang belum mempunyai status akan dikelola oleh Pemerintah Kota Batam. Pola penanganan terhadap ruas jalan yang telah dibangun semestinya dilakukan melalui Pemeliharaan Rutin dan Pemeliharaan Berkala. Terhadap ruas jalan yang telah selesai dibangun tahun ini, seharusnya tahun depannya sudah mulai dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan ini harus dilakukan secara teratur sehingga kondisi permukaan jalan selalu dalam keadaan baik dan umur pemanfaatan jalan menjadi lebih lama dan kemudian ditingkatkan kembali untuk menambah daya dukung jalan. Namun kenyataannya terhadap sebagian besar ruas jalan yang telah dibangun dalam tenggang waktu yang cukup lama tidak dilakukan pemeliharaan dengan baik, sehingga kerusakan jalan yang ada saat ini semakin parah dan apabila dilakukan perbaikan terhadap ruas jalan tersebut memerlukan biaya yang cukup besar. Hal ini diperparah lagi oleh seringnya badan jalan tergenang air pada waktu musim hujan karena tidak berfungsinya drainase secara baik serta tonase kendaraan yang melewati jalan tersebut yang melebihi daya dukung jalan.

Permasalahan lainnya yaitu Ketidakseimbangan antara volume kendaraan (v) dengan ketersediaan kapasitas jaringan jalan (c) sehingga terjadinya kepadatan lalu lintas pada kawasan pusat-pusat perekonomian dan permukiman. Selain itu kebutuhan akan peningkatan jalan utama pada kawasan permukiman baru yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan kota. Kebutuhan pembangunan jembatan untuk memperlancar lalu lintas juga masih terbatasnya jembatan penghubung antar pulau sebagai sarana penghubung masyarakat untuk beraktifitas dengan pulau yang berdekatan. Terakhir peningkatan aksesibilitas masyarakat di daerah Hinterland sehingga dapat berdampak pada peningkatan dan persebaran pembangunan di wilayah Kota Batam terutama di wilayah hinterland.

b. Bidang Penerangan Jalan Umum

Penambahan titik PJU bertujuan untuk mendukung aktifitas perekonomian, mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas pada malam hari dan juga mencegah tindakan kriminal di daerah-daerah tertentu. Selain itu PJU mampu dijadikan sebagai pencitraan bagi Kota Batam. Keberadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Batam sampai saat ini masih menyisakan permasalahan Penerangan Jalan Umum yaitu *Life Time* (Usia) Kabel, PJU Kota Batam sebelum tahun 2009 sebagian besar adalah hibah dari Otorita Batam, karena sudah dibangun sejak tahun 1990 maka jaringan kabel PJU sudah banyak yang rusak, akibatnya pada musim penghujan banyak didapati PJU yang mati. Selanjutnya adanya penggalian yang tumpah tindih untuk keperluan penggelaran jaringan oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi sering mengganggu jaringan PJU yang ada. Hal ini menyebabkan sejumlah PJU tidak dapat berfungsi (saat ini izin penggalian dikeluarkan oleh BP Batam). Kabel PJU sering hilang karena pencurian, terutama di daerah-daerah sepi. Kabel PJU memiliki nilai jual karena memakai bahan dasar tembaga. Keterbatasan Daya dari PLN di daerah Hinterland dan connecting dari PLN dikala musim hujan terkadang terjadi short pada sambungan aliran PLN ke lampu PJU.

II. Permasalahan Sumber Daya Air

a. Bidang Sumber Daya Air

Infrastruktur drainase yang ada di wilayah perkotaan sebagian besar sudah tidak mampu lagi mengalirkan debit air yang cukup besar yang disebabkan sebagian dimensi saluran sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Kota Batam saat ini (terjadinya perubahan tata guna lahan secara cepat tidak bisa diimbangi dengan penyediaan infrastruktur drainase kota, fungsi *Catchment Area* bukan sebagai daerah resapan air) dimana air hujan yang jatuh semuanya menjadi aliran permukaan (*run off*) dan hanya sedikit yang meresap ke dalam tanah sebagai sumbangan air tanah (sangat bermanfaat sebagai *base flow* pada musim kemarau). Sebagian lagi terjadi karena pendangkalan pada beberapa ruas drainase primer yang ada yang diakibatkan penumpukan lumpur (sedimen) dan sampah oleh perumahan masyarakat maupun rumah liar dan kios liar yang berada di sepanjang aliran saluran drainase kota. Sistem drainase yang ada belum memiliki *master plan* yang selaras dengan RTRW Kota sebagai pedoman di dalam penataan dan pembangunan drainase pada masa yang akan datang.

Sistem aliran drainase per-kawasan yang dilakukan selama ini dirasa cukup sulit untuk menjamin kelancaran sistem pembuangan air sampai ke pembuangan akhir terutama pada kawasan perumahan yang mempunyai elevasi dibawah saluran dan kawasan yang sudah jadi dan berpenghuni padat hal ini memerlukan penanganan secara khusus agar

saluran yang berada di kawasan ini berfungsi dengan baik. Selain itu Pekerjaan *cut and fill* yang tidak sesuai dengan kondisi tanah dan *grading plan* juga mengakibatkan terjadi longsor dan banjir di beberapa kawasan sehingga mengganggu aktivitas masyarakat. Pengalokasian lahan yang kurang memperhatikan sistem drainase kota secara komprehensif dan menyeluruh sehingga memperparah kondisi sistem drainase yang ada.

Penataan Permukiman Pantai di wilayah hinterland bertujuan untuk menyelamatkan bibir pantai dari ancaman abrasi laut dengan membuat pengaman tebing pantai pada pesisir pulau-pulau yang potensial terancam abrasi laut di wilayah hinterland. Pada wilayah pulau berpenghuni banyak kawasan pesisir pantai yang sudah terabrasi oleh air laut, namun luasnya sebaran pulau dan jarak yang cukup jauh dari pusat Kota (Pulau Batam) menyebabkan sulitnya pelaksanaan pembangunan pengaman tebing pantai terutama dalam hal mobilisasi bahan-bahan bangunan dan peralatan yang dipakai sehingga akan menyebabkan biaya konstruksi menjadi relatif mahal, disamping itu tidak semua pulau berpenghuni.

b. Bidang Peralatan dan Pengujian

Kebutuhan dan ketersediaan alat berat untuk mendukung pelaksanaan tugas urusan Pekerjaan Umum masih perlu di optimalkan khusus untuk mendukung dalam hal penanganan titik banjir di Kota Batam . Disamping itu ketersediaan sumber daya manusia, peralatan teknis dan laboratorium pengujian dan pendukung lainnya masih yang masih kurang.

III. Permasalahan Sekretariat

Masih belum optimalnya kemampuan, kompetensi dan kapasitas sumber daya aparatur dalam bidang infrastruktur pekerjaan umum baik dari segi perencanaan dan pengawasan/*supervise*. Untuk peningkatan kinerja maka diperlukan juga ketersediaan sarana dan prasarana penunjang.

Tabel 3.1 Data 42 Titik Bajar di Kota Batam

NO	Titik Banjir yang Ditangani	Wilayah Genangan				
		Luas	Tinggi	Lama	Frekuensi	Penyebab
		Ha	m	Jam/Hari	Kali/Th	
1	Sei Tering (Pasar Melcem)	4	0,1-1	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil dan daerah cekungan
2	SPBU Jodoh(belakang BCA)	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
3	Jl. Duyung (Simpang Polsek Batu Ampar)	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
4	Depan Rumah Duka Baloi	2	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil dan daerah cekungan
5	Depan Perumahan Taman Kota Mas	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
6	Kawasan Bengkong Indah/Bengkong Swadebi	3	0,1-1	0,5-1	3	Kapasitas saluran kecil dan pasang surut
7	Bengkong Dalam Tanjung Buntung	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
8	Perumahan Legenda Malaka - Legenda Bali	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
9	Perumahan Taman Raya (SMPN 28)	2	0,1-1	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil dan daerah cekungan
10	Belakang Perumahan Duta Mas (Simpang Tiga Kampung Air - Rusunawa Batam Center)	2	0,1-1	0,5-1	3	Kapasitas saluran kecil dan daerah cekungan
11	Depan Botania Plaza	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
12	Perumahan Orchard Suite dan Citra Indah	2	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
13	Depan Perumahan Bida Asri 2	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil dan daerah cekungan
14	Jl. Hang Kesturi (Depan Industri Taiwan)	2	0,1-0,5	0,5-1	3	Kapasitas saluran kecil dan daerah cekungan
15	Kantor Camat Nongsa	3	0,1-1	0,5-1	3	Kapasitas saluran kecil dan daerah cekungan
16	Perumahan Citra Mas Batu Besar	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
17	Kampung Mangga	2	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil dan pasang surut
18	Perumahan Green Nongsa City	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
19	Depan Kavling Senjulang (Dekat Tunas Kabil)	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
20	Perumahan Kodim Batu Aji	2	0,1-1	0,5-2	3	Kapasitas saluran kecil dan daerah cekungan
21	Perumahan Sierra dan Masyeba Indah Batu Aji	2	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil dan daerah cekungan
22	Jl. Brigjen Katamso Depan PT . Asiatic Shipyard (Hyundai,Nippon	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil dan daerah cekungan
23	Jl. Letjen Soeprapto (Depan Kantor Lurah Tembesi/Masjid Al Amin)	2	0,1-1	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil dan daerah cekungan
24	Belakang Gereja Mahanaim	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil dan daerah cekungan
25	Perumahan Tembesi Raya	1	0,1-1	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil dan daerah cekungan
26	Jl. Pahlawan (Depan Aviari-RSUD Embung Fatimah)	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil dan daerah cekungan
27	Perumahan Putri Tujuh	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
28	Jl. Raya Dapur 12 & Kav Mandiri Kec. Sagulung	1	0,1-0,5	0,5-1	1	Kapasitas saluran kecil
29	Jl. Menuju Jembatan I (Depan Mako Brimob Tembesi)	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
30	Jalan Menuju Pelabuhan Rakyat Sagulung	1	0,1-0,5	0,5-1	1	Kapasitas saluran kecil
31	Kavling Melati	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
32	Depan Villa Muka Kuning	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
33	Kawasan Perumahan Taman Cipta Asri Tembesi	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
34	Belakang Sagulung Mall	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
35	Perumahan Anggara Sagulung Kota	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
36	Perumahan Puri Barata	2	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
37	Perumahan Devin Premier Marina	2	0,1-0,5	0,5-1	3	Daerah cekungan
38	Kawasan Industri Sekupang	1	0,1-0,5	0,5-1	1	Kapasitas saluran kecil
39	Perumahan Kartini Raya dan Pondok Pratiwi	3	0,1-0,5	0,5-1	3	Daerah cekungan dan Pasang Surut
40	Perumahan Graha Mas Marina	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
41	Komplek Rusunawa Tanjung Piayu/Kantor BPJN	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
42	Jl. S. Parman (depan Perum. Bida Ayu dan Bukit Kemuning)	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil

Adapun rekap Indentifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi Pelayanan Perangkat Daerah (PD) dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan PD

No	Aspek	Permasalahan
1	Permasalahan dalam Bina Marga	1. Sebagian besar ruas jalan Kota Batam tidak dilakukan pemeliharaan dengan baik dalam tenggang waktu yang cukup lama, sehingga berakibat menurunnya kualitas jalan Kota Batam. 2. Ketidakseimbangan antara volume kendaraan dengan ketersediaan kapasitas jaringan jalan. 3. Pencapaian target infrastruktur binamarga pada periode 2016-2021 belum optimal. 4. Tidak berfungsinya drainase sehingga menyebabkan Genangan air pada Badan jalan. 5. Tonase Kendaraan yang melewati Jalan melebihi daya dukung jalan. 6. Kebutuhan Jalan baru pada kawasan permukiman baru 7. Kurangnya Sinkronisasi Pengelolaan Ruas Jalan APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Batam. 8. Kebutuhan Jembatan untuk memperlancar lalu lintas. 9. Terbatasnya Jembatan penghubung antar pulau. 10. Terbatasnya Anggaran Penanganan Jalan. 11. Life time Komponen Penerangan Jalan Umum 12. Kabel putus akibat Galian kabel yang tumpang tindih (Izin penggalian di keluarkan oleh BP Batam). 13. Pencurian kabel yang terpasang pada Penerangan Jalan Umum. 14. Keterbatasan dan gangguan supplai listrik dari PLN.
2	Permasalahan dalam Sumber Daya Air	1. Terbatasnya Anggaran Penanganan drainase. 2. Volume saluran drainase sudah tidak sesuai dengan perkembangan Kota Batam 3. Pencapaian target infrastruktur sumber daya air pada periode 2016-2021 belum optimal 4. Berkurangnya daerah resapan air terhadap perkembangan pembangunan kota Batam. 5. Pendangkalan di beberapa ruas drainase. 6. Belum memiliki master plan yang selaras dengan RTRW Kota Batam. 7. Elevasi Drainase berada di atas perumahan. 8. Sulitnya Mobilisasi peralatan dan bahan pada bangunan pengaman pantai di daerah hinterland sehingga menyebabkan biaya konstruksi menjadi relatif mahal.
3	Permasalahan dalam Sekretariat	1. Kebutuhan sarana prasarana penunjang tupoksi dinas belum memadai. 2. Kompetensi dan kapasitas sumber daya aparatur dalam bidang infrastruktur masih kurang.
4	Permasalahan terakait koordinasi dan perencanaan	1. Koordinasi antara instansi terkait infrastruktur yang belum optimal. 2. Kualitas perencanaan program yang masih belum optimal

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1 VISI PEMERINTAH KOTA BATAM

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Batam dalam hal menyelenggarakan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi Pembangunan Kota Batam Tahun 2021–2026:

“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera”

Visi tersebut mengandung empat pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Batam pada tahun 2026, yaitu **Bandar Dunia, Madani, Modern** dan **Sejahtera**. Pokok visi **Bandar Dunia, Madani**, dan **Sejahtera** menunjukkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai di tahun 2026, sementara pokok visi “Modern” menunjukkan penekanan cara atau ‘bagaimana’ untuk mencapai ketiga pokok visi lainnya. Makna terinci ke empat pokok visi di atas adalah sebagai berikut:

- a. **Bandar Dunia** mengandung makna Kota Batam diarahkan menjadi kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis yang berpotensi menjadi “*center of excellence*”.
- b. **Madani** bermakna pembangunan Kota Batam diarahkan untuk mewujudkan masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi, berbanding lurus dengan konsep *civil society*.
- c. **Sejahtera** mengandung makna kondisi masyarakat yang utuh lahir dan batin meliputi kondisi yang baik di tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan, rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensi ada.
- d. **Modern** mengandung makna sebagai sikap, cara berfikir, dan cara bertindak yang produktif, berdaya saing, mandiri, terampil dan inovatif dengan mengedepankan tatanan sosial yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan.

Pokok visi “modern” menjadi cara atau strategi bagaimana mencapai tiga pokok visi lainnya. Pengembangan Kota Batam dalam lima tahun kedepan diarahkan untuk membiasakan dan mendorong *pentahelix* pembangunan, meliputi pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi maupun lembaga di masyarakat, berperilaku “modern” untuk mewujudkan Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani dan Sejahtera.

3.2.2 MISI PEMERINTAH KOTA BATAM

Untuk mencapai visi “**TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA**”, beberapa misi penyelenggaraan pemerintahan periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi yang pertama, Kota Batam sebagai Bandar Dunia. Sesuai potensi ekonomi lokal yang ada, maka aktivitas perekonomian Kota Batam bertumpu pada pengembangan sektor unggulan daerah, yaitu industri, perdagangan, dan pariwisata dengan tetap menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, lokasi Kota Batam yang strategis merupakan keunggulan wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat alih kapal yang kompetitif dan dinamis serta atraktif bagi pelaku bisnis sehingga menjadi "*center of excellence*" di Asia Tenggara. Dengan demikian, Kota Batam diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang mantap namun tetap memperhatikan pemerataan pendapatan atau pun produktifitas ekonomi antar kelompok masyarakat maupun wilayah.
2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang. Misi ini juga menjadi bagian upaya pencapaian pokok visi Kota Batam sebagai Bandar Dunia. Untuk menciptakan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan dan pariwisata, serta *centre of excellence* di Asia Tenggara, maka pengembangan dukungan infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju menjadi keharusan. Selain itu, penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaku bisnis melalui kota yang ramah, aman dan nyaman juga menjadi keharusan. Kota Batam diharapkan menjadi kota yang layak huni.
3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera”, yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera berbasis potensi sumber daya lokal, baik kualitas hidup masyarakat meningkat, yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan manusia serta menurunnya masyarakat miskin. Kesejahteraan ekonomi tercapai saat masyarakatnya produktif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap yang bersumber dari peningkatan produktifitas sektor-sektor ekonomi potensial (lokal). Kesejahteraan di bidang budaya tercermin dari berkembangnya potensi budaya daerah/lokal, masyarakat yang memiliki rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensinya, khususnya saat berperan serta dalam pembangunan.

4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera” sekaligus “Bandar Dunia”. Dibalik lokasi wilayah yang strategis, Kota Batam yang merupakan wilayah kepulauan memiliki tantangan pembangunan tersendiri untuk menjamin pembangunan segala bidang yang merata di seluruh wilayah. Masyarakat Kota Batam yang “sejahtera” akan terwujud secara merata jika pembangunan daerah *hinterland*, khususnya infrastruktur dasar dan daerah, sebagai wilayah penopang Kota Batam dipercepat sehingga tidak terlalu jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan daerah *mainland*/kota.

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Madani”, yaitu masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi dan berban ding lurus dengan konsep *civil society*. Permasalahan-permasalahan pembangunan yang terjadi di Kota Batam salah satunya dikarenakan oleh keterbatasan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung pelayanan, pengelolaan keuangan daerah hingga sistem/kelembagaan pemerintahan. Penyelenggaraan birokrasi yang profesional dan berintegritas merupakan upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi sehingga terjadi peningkatan kualitas pemerintah dalam memberikan pelayanan maupun menyelenggarakan urusan pemeritahan lainnya yang mampu menjadi modal atau penggerak pembangunan Kota Batam.

Misi, tujuan dan sasaran, urusan dan program RPJMD yang terkait dengan peran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam ada dalam **Misi Kedua** yang diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3 Tabel Misi, tujuan dan sasaran, urusan dan program RPJMD yang terkait dengan Peran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

NO.	MISI	TUJUAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Program PD
1	2	3	4	5	6	7
1	2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.	2.1. Mewujudkan Infrastruktur Kota dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berkelanjutan dengan Berwawasan Lingkungan.	Terwujudnya Infrastruktur Jalan Yang Mantap.	Meningkatnya Jalan Dalam Kondisi Mantap.	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap.	Program Penyelenggaraan Jalan. Program Pengembangan Jasa Konstruksi. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
			Terwujudnya Sistem Drainase Yang Optimal Dalam Rangka Pengendalian / Penanganan Banjir	Meningkatnya Penanganan Titik Banjir	Persentase Titik Banjir Yang Ditangani (42 Titik Banjir Sebagai Baseline)	

Sedangkan untuk program prioritas dan kegiatan unggulan RPJMD Kota Batam tahun 2021 - 2026 yang didukung/diemban oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam antara lain sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan Kota Batam yang mantap serta peningkatan jalan utama tuntas. Untuk program prioritas dan kegiatan unggulan RPJMD Kota Batam tahun 2021 – 2026, direnakan akan dipenuhi dengan pencapaian indikator sasaran meningkatnya jalan dalam kondisi mantap target pencapaian 90 persen kondisi jalan mantap. Untuk memenuhi peeningkatan jalan utama tuntas dilakukan dengan Program Penyelenggaraan Jalan, yang direncanakan 24 km jalan utama akan diselesaikan yang merupakan 100% dari target panjang jalan utama yang akan diselesaikan tahun 2021 – 2026.
2. Pengendalian/Penanganan Banjir Tuntas. Untuk program prioritas dan kegiatan unggulan RPJMD Kota Batam tahun 2021 – 2026 direnakan akan dipenuhi dengan pencapaian indikator sasaran meningkatnya penanganan titik banjir target pencapaian 100 persen.

3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi

3.3.1 Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:
“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.

- Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tujuan

- Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
- Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
- Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
- Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Target utama Kementerian PUPR 2020 – 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.4 Tabel Target utama Kementerian PUPR 2020 – 2024

SUMBER DAYA AIR	KONEKTIVITAS	PERMUKIMAN	PERUMAHAN
58,5 m ³ /kapita/tahun Peningkatan Kapasitas Daya Tampung	2.500 Km Pembangunan Jalan Tol	100% Akses Air Minum Layak 30% Jaringan Perpipaan	51.340 Unit Rumah Susun
61 Unit Bendungan	3.000 Km Pembangunan Jalan Baru	90% Akses Sanitasi Layak 15% Termasuk Aman	10.000 Unit Rumah Khusus
500 Unit Pembangunan Embung	38.328 m Pembangunan Jembatan	10.000 Ha Penanganan Permukiman Kumuh	813.660 Unit Rumah Swadaya
500.000 Ha Pembangunan Daerah Irigasi	31.053 m Pembangunan Fly Over/Underpass	100% Hunian Dengan Akses Sampah Terkelola Baik di Perkotaan	262.345 Unit PSU Perumahan
2.000.000 Ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi		5.555 Unit Pembangunan & Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan,	
50 m ³ /detik Ketersediaan Air Baku			
2.100 Km Pengendali Banjir dan			

3.3.2 Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau

Rumusan strategi jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dikelompokkan berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

Tujuan ke-1: Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.

Sasaran:

Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam

Tujuan ke-2: Peningkatan cakupan layanan infrastruktur dasar kawasan permukiman bidang cipta karya

Sasaran:

- 1) Meningkatkan cakupan pelayanan air minum layak.
- 2) Meningkatkan pelayanan pengolahan limbah domestik
- 3) Meningkatkan pelayanan drainase perkotaan
- 4) Meningkatkan pelayanan persampahan regional

Tujuan ke-3: Penataan bangunan lingkungan, bangunan gedung dan infrastruktur permukiman di KSP

Sasaran:

- 1) Terwujudnya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan infrastruktur permukiman pada Kawasan Strategis Daerah Provinsi.
- 2) Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi.
- 3) Terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi.

Tujuan ke-4: Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata

Sasaran:

Meningkatnya kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata

Tujuan ke-5: Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional

Sasaran:

Meningkatnya pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional

Tujuan ke-6: Perwujudan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Sasaran:

Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Tujuan ke 7: Perwujudan pengadaan lahan untuk kepentingan umum.

Sasaran:

Terwujudnya pengadaan lahan untuk kepentingan umum.

Tujuan ke 8: Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Sasaran:

Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

3.3.5 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR), Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan (PUPRP) Provinsi Kepulauan Riau dan Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Batam.

Dalam melakukan telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam telah mengacu pada hubungan sasaran strategis Renstra terkait yang diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5 telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau dan Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

NO	Indikator Kinerja	Sasaran Pada Renstra Dinas BMSDA Kota Batam	Renstra Kementerian PUPR	Renstra Dinas PUPRP Provinsi Kepulauan Riau
1.	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap.	Meningkatnya Jalan Dalam Kondisi Mantap.	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional	Meningkatnya kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata.
2.	Persentase Titik Banjir Yang Ditangani (42 Titik Banjir Sebagai Baseline).	Meningkatnya Penanganan Titik Banjir.	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA	Meningkatnya pelayanan drainase perkotaan

Faktor pendorong terkait Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Dinas PUPRP Provinsi Kepulauan Riau antara lain sebagai berikut :

1. Ditetapkannya Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas maka diharapkan alokasi pembangunan dalam bidang infrastruktur dengan menggunakan APBN maupun APBD provinsi akan meningkat di Kota Batam.
2. Selain itu dengan Kota Batam masuk kedalam lokasi prioritas pengembangan kawasan perbatasan di wilayah perbatasan maka diharapkan percepatan pembangunan khususnya bidang infrastruktur akan semakin meningkat.

Sedangkan Faktor penghambat terkait Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Dinas PUPRP Provinsi Kepulauan Riau antara lain sebagai berikut :

1. Masih adanya bencana non alam *covid 19*, sehingga akan berakibat pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan sehingga alokasi anggaran masih akan diprioritaskan ke bidang kesehatan.
2. Belum optimalnya koordinasi antara instansi terkait infrastruktur.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS)

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Sementara itu kajian lingkungan hidup strategis dilakukan untuk mengetahui kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan dan dapat memperkirakan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Batam nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021 -2041. Pada Pusat Kota dikembangkan kegiatan-kegiatan pelayanan perkotaan untuk mendukung pengembangan fungsi-fungsi utama wilayah Kota Batam (pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, alih muat angkutan laut, pariwisata, dan lain-lain), serta kegiatan-kegiatan pelayanan tertentu terkait dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang didukung dengan infrastruktur yang memadai. Untuk memperkuat orientasi dan pergerakan eksternal Kota Batam di era persaingan global, dilakukan peningkatan kualitas layanan dan pengembangan simpul-simpul (outlet) transportasi berupa bandara, pelabuhan laut, dan pelabuhan penyeberangan untuk menciptakan akses regional, nasional, dan internasional yang lebih berdayaguna, berhasilguna, dan berdaya saing. Untuk menunjang berbagai kegiatan penghidupan dan kehidupan kota, selain sistem jaringan transportasi juga ditingkatkan pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana yang lain yaitu: jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan penyehatan lingkungan permukiman. Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau Kota (hutan lindung, hutan kota, jalur hijau, taman median jalan, tamankota, taman lingkungan, bumi perkemahan dll) dalam rangka mewujudkan tutupan hijau, untuk meningkatkan fungsi lindung wilayah kota, peresapan air, pengaturan iklim mikro, dan estetika kota

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam pada dokumen RTRW Kota Batam merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, khususnya dalam bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air. Adapun di dalam Dokumen RTRW Kota Batam Tahun 2021-2041 diarahkan kinerja secara ekspilisit pada arah pemanfaatan ruang yang ada sesuai dengan bidang urusan yang diampu. Adapun indikasi program utama berdasarkan RTRW Kota Batam 2021-2041 yang menjadi tanggung jawab Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dalam rangka pencapaian visi misi Walikota dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021 - 2026 telah diakomodir dalam Program dan Kegiatan Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam 2021 - 2026 antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.6 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Program Utama RTRW Kota Batam 2021-2041	Program Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam 2021 - 2026
I.	Sistem Jaringan Transportasi Darat.	Program Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan ; (1) Pembangunan Jalan, Pelebaran Jalan Menambah Lajur, (2) Rekonstruksi Jalan, (3) Pemeliharaan Berkala Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan, dan (4) Pembangunan Jembatan / Pelantar.
II.	Sistem Jaringan Sumber Daya Air.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan ; (1) Normalisasi/Restorasi Sungai, (2) Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir, (3) Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya.
III.	Infrastruktur Perkotaan Sistem Jaringan Drainase	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan (1) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan, (2) Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan, (3) Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan (4) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase.
IV.	Kawasan Perlindungan Setempat, Pembangunan Tebing Penahan Pantai.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (1) Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya.

Adapun Faktor pendorong terkait RTRW Kota Batam adalah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Batam nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021 -2041, sehingga menjadi panduan dasar dalam pembangunan infrastruktur Kota Batam kedepannya. Sedangkan faktor penghambat terkait RTRW Kota Batam antara lain disamping kebutuhan anggaran yang relatif besar adalah belum optimalnya koordinasi dengan pihak – pihak terkait pengembangan infrastruktur di Kota Batam.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang diterapkan pada tingkat/tataran hulu. Dengan dilakukannya KLHS pada tataran hulu Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) maka potensi dihasilkannya KRP yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya berimplikasi pada terjadinya kerusakan lingkungan hidup dapat diantisipasi sejak dini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manfaat yang diperoleh dengan melakukan KLHS adalah dihasilkannya KRP yang lebih baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi kerangka integratif bagi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam untuk:

- Meningkatkan manfaat pembangunan.
- Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan.
- Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun antarnegara (jika diperlukan) dan kemudian menjadi acuan dasar bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan program.
- Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat perkiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan.
- Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.

Selanjutnya Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yaitu dengan melihat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan KLHS yang terkait dengan tujuan Strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan KLHS	Indikator KLHS	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam
9.1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	Kondisi mantap jalan nasional	Tujuan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam; Terwujudnya Infrastruktur Jalan Yang Mantap. Sasaran Strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam; Meningkatnya Jalan Dalam Kondisi Mantap

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan KLHS sudah selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam 2021-2026. Faktor pendorong terkait KLHS Kota Batam terhadap Tujuan dan Sasaran sasaran strategis Dinas Binan Marga dan Sumber Daya Air adalah adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan KLHS dan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam. Selanjutnya yang menjadi faktor penghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan KLHS dan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam adalah belum optimalnya koordinasi antara instansi terkait infrastruktur.

3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1. Pemenuhan Kualitas Jaringan Jalan Mantap Yang Belum Optimal;
- 2. Masih terdapat titik banjir/genangan air (42 titik) di Kota Batam;
- 3. Masih belum optimalnya sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana pendukung;
- 4. Koordinasi antara instansi terkait infrastruktur yang belum optimal;
- 5. Menyelaraskan pembangunan infrastruktur bidang bina marga dan sumber daya air sesuai RTRW serta pengarustamaan gender.

Untuk menentukan nilai skala kriteria isu-isu strategis dalam penentuan isu – isu strategis pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam ditetapkan dengan parameter penilaian dengan menggunakan skala linkert, Nilai bobot kriteria dikalikan nilai Skala prioritas antarara lain sebagai berikut :

- 1. Nilai 1 untuk skala tidak prioritas ;
- 2. Nilai 2 untuk skala kurang prioritas ;
- 3. Nilai 3 untuk skala cukup prioritas ;
- 4. Nilai 4 untuk skala prioritas;
- 5. Nilai 5 untuk skala sangat prioritas.

Tabel 3.8 Penentuan isu strategis

No.	Kriteria	Bobot
(1)	Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten.	30
(2)	Merupakan tugas dan tanggungjawab Perangkat Daerah.	20
(3)	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik.	15
(4)	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah.	20
(5)	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani.	15
Total		100

Langkah akhir menghitung total skor dengan kategori sebagai berikut :

- 500 – 400 termasuk isu strategis yang sangat penting;
- 400 – 300 termasuk isu strategis yang penting;
- 300 – 200 termasuk isu strategis yang cukup penting;
- 200 > termasuk isu strategis yang kurang penting

Adapun pembahasab terkait kriteria - kriteria menyangkut isu - isu strategis antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.9 Penentuan Nilai Skala Prioritas terhadap Isu – Isu Strategis

No	Isu Strategis/Program Prioritas	Nilai Skala Terhadap Kriteria Ke-					Skor
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Pemenuhan Kualitas Jaringan Jalan Mantap Yang Belum Optimal	5	5	5	4	4	23
2.	Masih terdapat titik banjir/genangan air (42 titik) di Kota Batam.	5	5	5	4	4	23
3.	Masih belum optimalnya sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana pendukung.	4	4	4	4	4	20
4.	Koordinasi antara instansi terkait infrastruktur yang belum optimal.	4	3	3	4	3	17
5.	Menyelaraskan pembangunan infrastruktur bidang bina marga dan sumber daya air sesuai RTRW serta pengarustamaan gender.	4	3	4	3	3	17

Kemudian nilai - nilai isu strategis tersebut dikalikan dengan skala bobot kriteria hingga didapatlah total skor untuk setiap kriteria yang nantinya dijumlahkan secara keseluruhan dan disitulah terdapat total skor masing masing isu strategi.

Tabel 3.10 Perkalian Isu Strategis Skala Prioritas Terhadap Bobot

No	Isu Strategis/Program Prioritas	Nilai Skala Terhadap Kriteria Ke-					Total Skor
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Pemenuhan Kualitas Jaringan Jalan Mantap Yang Belum Optimal.	150	100	75	80	75	480
2.	Masih terdapat titik banjir/genangan air (42 titik) di Kota Batam.	150	100	75	80	75	480
3.	Koordinasi antara instansi terkait infrastruktur yang belum optimal.	120	80	60	80	60	350
4.	Koordinasi antara instansi terkait infrastruktur yang belum optimal.	120	60	45	80	45	350
5.	Menyelaraskan pembangunan infrastruktur bidang bina marga dan sumber daya air sesuai RTRW serta pengarustamaan gender.	60	80	60	60	45	305

Berdasarkan total skor pada tabel diatas didapatkan bahwa isu strategis diatas dapat dikategorikan pada isu strategis yang sangat penting dan penting. Selanjutnya dalam hubungannya antara aspek permasalahan yang dikaitkan dengan isu – isu strategis yang akan ditangani antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.11 Aspek, Permasalahan dan Isu Strategis

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Permasalahan dalam Bina Marga	1. Sebagian besar ruas jalan Kota Batam tidak dilakukan pemeliharaan dengan baik dalam tenggang waktu yang cukup lama, sehingga berakibat menurunnya kualitas jalan Kota Batam. 2. Ketidakseimbangan antara volume kendaraan dengan ketersediaan kapasitas jaringan jalan. 3. Pencapaian target infrastruktur binamarga pada periode 2016-2021 belum optimal. 4. Tidak berfungsinya drainase sehingga menyebabkan Genangan air pada Badan jalan. 5. Tonase Kendaraan yang melewati Jalan melebihi daya dukung jalan. 6. Kebutuhan Jalan baru pada kawasan permukiman baru. 7. Kurangnya Sinkronisasi Pengelolaan Ruas Jalan APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Batam. 8. Kebutuhan Jembatan untuk memperlancar lalu lintas. 9. Terbatasnya Jembatan penghubung antar pulau. 10. Terbatasnya Anggaran Penanganan Jalan. 11. Life time Komponen Penerangan Jalan Umum. 12. Kabel putus akibat Galian kabel yang tumpang tindih (Izin penggalian di keluarkan oleh BP Batam). 13. Pencurian kabel yang terpasang pada Penerangan Jalan Umum. 14. Keterbatasan dan gangguan suplai listrik dari PLN.	Pemenuhan Kualitas Jaringan Jalan Mantap Yang Belum Optimal.
2.	Permasalahan dalam Sumber Daya Air	1. Terbatasnya Anggaran Penanganan drainase. 2. Volume saluran drainase sudah tidak sesuai dengan perkembangan Kota Batam. 3. Pencapaian target infrastruktur sumber daya air pada periode 2016-2021 belum optimal. 4. Berkurangnya daerah resapan air terhadap perkembangan pembangunan kota Batam. 5. Pendangkalan di beberapa ruas drainase. 6. Belum memiliki master plan yang selaras dengan RTRW Kota Batam. 7. Elevasi Drainase berada di atas perumahan. 8. Sulitnya Mobilisasi peralatan dan bahan pada bangunan pengaman pantai di daerah hinterland sehingga menyebabkan biaya konstruksi menjadi relatif mahal.	Masih terdapat titik banjir/genangan air (42 titik) di Kota Batam.
3.	Permasalahan dalam Sekretariat	1. Kebutuhan sarana prasarana penunjang tupoksi dinas belum memadai. 2. Kompetensi dan kapasitas sumber daya aparatur dalam bidang infrastruktur masih kurang.	Masih belum optimalnya sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana pendukung.
4.	Permasalahan terakait koordinasi dan perencanaan	1. Koordinasi antara instansi terkait infrastruktur yang belum optimal. 2. Kualitas perencanaan program yang masih belum optimal	Koordinasi antara instansi terkait infrastruktur yang belum optimal. Dan Menyelaraskan pembangunan infrastruktur bidang bina marga dan sumber daya air sesuai RTRW serta pengarusamaan gender.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI & KEBIJAKAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam sesuai dengan tugas pokoknya melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang bina marga dan sumber daya air serta tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2021 – 2026. Adapun misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2021 – 2026 yang terkait dengan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam antara lain sebagai berikut.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis yang akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, yang terkait dengan misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2021 – 2026 yang terkait dengan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

NO.	MISI	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD
1	2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang	2.1. Mewujudkan Infrastruktur Kota dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berkelanjutan dengan Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan	2.1.3. Tersedianya Infrastruktur Perkotaan Yang Aman, Nyaman Dan Terpadu Serta Kawasan Permukiman Yang Layak Huni	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Tabel 4.2 Tujuan PD, Sasaran PD dan Indikator Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Formulasi, cara menghitung, sumber data
Mewujudkan infrastruktur Pekerjaan Umum yang aman, nyaman dan terpadu		Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum	$\frac{(\% \text{ Jalan Dalam Kondisi Mantap}) + (\% \text{ Titik Banjir Yang Ditangani (42 Titik Banjir Sebagai Baseline)})}{2}$
	Meningkatnya Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	$\frac{\text{Panjang Jalan Kondisi Mantap}}{\text{Panjang Jalan Kota Batam}} \times 100\%$
	Meningkatnya Penanganan Titik Banjir	Persentase Titik Banjir Yang Ditangani (42 Titik Banjir Sebagai Baseline)	$\frac{\text{Jumlah Titik Banjir yang Ditangani}}{\text{Titik Banjir Kota Batam (42 Titik Banjir sebagai Baseline)}} \times 100\%$

Selanjutnya target pencapaian Sasaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam sekaligus target pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air

TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mewujudkan infrastruktur Pekerjaan Umum yang aman, nyaman dan terpadu		Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum	49,75%	56%	62,25%	68,50%	81,25%	95%
	Meningkatnya Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	87,5%	88%	88,5%	89%	89,5%	90%
	Meningkatnya Penanganan Titik Banjir	Persentase Titik Banjir Yang Ditangani (42 Titik Banjir Sebagai Baseline)	12%	24%	36%	48%	73%	100%

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dalam kaitannya dengan Visi dan Misi, Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Pemerintah Kota Batam 2021 - 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dapat dijelaskan pada table berikut :

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RPJMD Kota Batam 2021-2026
Terkait Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam 2021-2026**

ISU STRATEGIS : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar			
VISI : Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera			
MISI 2 : Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan Didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang			
TUJUAN 3: Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan.	Sasaran 10: Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni.	1. Strategi 10.1: Meningkatkan kualitas jaringan jalan.	1. Kebijakan 3.10.1.1 : Melakukan pembangunan, pelebaran, rekonstruksi, dan pemeliharaan infrastruktur jalan.
			2. Kebijakan 3.10.1.2 : Melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur jalan .
		2. Straegi 10. 2: Meningkatkan kualitas jaringan drainase.	1. Kebijakan 3.10.2.1: Melakukan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur drainase.
			2. Kebijakan 3.10.2.2: Melakukan normalisasi drainase.

Selanjutnya berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam RPJMD Pemerintah Kota Batam 2021 – 2026 maka diturunkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam 2021 – 2026, antara lain sebagai berikut :

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Infrastruktur Jalan Yang Mantap	Meningkatnya Jalan Dalam Kondisi Mantap	Meningkatkan kualitas infrastruktur Jalan	Melakukan pembangunan, pelebaran, rekonstruksi, dan pemeliharaan infrastruktur jalan
			Melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur jalan
Mewujudkan Sistem Drainase Yang Optimal Dalam Rangka Pengendalian / Penanganan Banjir	Meningkatnya Penanganan Titik Banjir	Meningkatkan kualitas infrastruktur drainase	Melakukan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur drainase
			Melakukan normalisasi drainase

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan diatas, selanjutnya guna dapat implementasikan dalam mencapai sasaran pembangunan Kota Batam, maka strategi pembangunan tersebut dapat dilaksanakan dalam program pembangunan daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam. Adapun pencapaian yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam 2021 -2026 yang berdasarkan isu – isu strategis antara lain sebagai berikut :

1. Mewujudkan infrastruktur jalan yang mantap;
2. Mewujudkan sistem drainase yang optimal dalam rangka pengendalian / penanganan banjir;
3. Pemenuhan peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung;
4. Meningkatkan koordinasi antara instansi terkait infrastruktur;
5. Menyelaraskan pembangunan infrastruktur bidang bina marga dan sumber daya air sesuai RTRW serta pengarustamaan gender.

Selanjutnya program prioritas dan kegiatan unggulan di RPJMD Kota Batam 2021 – 2026 yang terkait dengan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam antara lain sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan Kota Batam yang mantap serta peningkatan jalan utama tuntas. Untuk program prioritas dan kegiatan unggulan RPJMD Kota Batam tahun 2021 – 2026, direnakan akan dipenuhi dengan pencapaian indikator sasaran meningkatnya jalan dalam kondisi mantap target pencapaian 90 persen kondisi jalan mantap. Untuk memenuhi peeningkatan jalan utama tuntas dilakukan dengan

Program Penyelenggaraan Jalan, yang direncanakan 24 km jalan utama akan diselesaikan yang merupakan 100% dari target panjang jalan utama yang akan diselesaikan tahun 2021 – 2026.

2. Pengendalian/Penanganan Banjir Tuntas. Untuk program prioritas dan kegiatan unggulan RPJMD Kota Batam tahun 2021 – 2026 direncanakan akan dipenuhi dengan pencapaian indikator sasaran meningkatnya penanganan titik banjir target pencapaian 100 persen.

Pembangunan infrastruktur bina marga dan sumber daya air perlu selaras dengan pengembangan sistem distribusi barang/jasa, sekaligus mendukung upaya pengembangan wilayah. Untuk itu pembangunan infrastruktur perlu didorong untuk mendukung kelancaran arus barang dan jasa sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Arah pembangunan infrastruktur bina marga dikaitkan dengan upaya perwujudan fungsi - fungsi kawasan sebagai pusat pertumbuhan wilayah, simpul transportasi, pusat kegiatan ekspor-impor (lokasi kawasan industri), dan pusat kegiatan bisnis jasa (lokasi perkantoran dan perbankan/keuangan), serta perwujudan keterkaitan dengan wilayah sekitarnya yang saling menguntungkan. Selanjutnya Arah pembangunan jaringan infrastruktur sumber daya air dikaitkan dengan upaya untuk penanganan titik – titik banjir di Kota Batam, pengendalian daya rusak air pada kawasan publik antara lain saluran primer dan sekunder yang menuju sempadan sungai, sempadan pantai, dan daerah rawan bencana.

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, lingkungan internal pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal cenderung diluar kendali. Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut sebagai faktor penentu keberhasilan (Critical Success Factor / CSF). Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air Kota Batam menggunakan metode atau teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) atau analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut :

Tabel 5.3 Analisis SWOT

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang (O)	Tantangan(T)
	1 Adanya dukungan dan kerjasama dari Kementerian/Lembaga, BP Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Perangkat Daerah Kota Batam serta Pihak Lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur	1 Masih belum Optimalnya Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, BP Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Perangkat Daerah Kota Batam serta Pihak Lain
	2. Adanya Peraturan Perundang - Undangan yang mendukung Pelaksanaan Tugas.	2. Pemahaman terhadap Peraturan Perundang - Undangan yang mendukung Pelaksanaan Tugas yang masih belum maksimal.
	3. Adanya dukungan Penyedia Jasa Bidang Kontruksi.	3. Kompetensi Penyedia Jasa Bidang Kontruksi masih perlu ditingkatkan.
	4. Adanya Protokol Kesehatan dan SOP dalam Pelaksanaan Tugas .	4. Bencana non alam pandemi covid 19 yang masih belum selesai.
Kekuatan (S)	Alternatif Strategi (S -O)	Alternatif Strategi (S -T)
1 Adanya Komitmen yang kuat Pimpinan dan Pegawai Dinas terhadap pelaksanaan tugas.	1. Meningkatkan proses kelancaran pelaksanaan tugas dan profesionalisme melalui peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya aparatur.	Komitmen untuk meningkatkan koordinasi dalam hal penyediaan infrastuktur di Kota Batam
2. Adanya SOTK Dinas yang mendukung Pelaksanaan Tugas.		
3. Adanya Aparatur Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung Pelaksanaan Tugas.		
4. Adanya Sarana dan prasarana pendukung Pelaksanaan tugas.		
5. Adanya Prioritas Alokasi Anggaran Bidang Infrastruktur.		
Kelemahan (w)	Alternatif Strategi (W -O)	Alternatif Strategi (W -T)
1 Kinerja dan Disiplin Pegawai yang belum optimal.	1 Komitmen yang semakin meningkatn untuk menegakkan disiplin dan menerapkan SOP.	Komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur dan penyedia
2. SOTK belum didukung secara optimal oleh SOP dalam pelaksanaan tugas .		Jasa Bidang Kontruksi
3. Kemampuan, kompetensi dan kapasitas sumber serta kuantitas aparatur Sumber Daya Manusia (SDM) belum optimal.	2. Komitmen untuk prioritas dalam menyediakan alokasi anggaran di bidang infrastruktur pada Kementerian/Lembaga, BP Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Perangkat Daerah Kota Batam serta Pihak Lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur di Kota Batam	
4. Operasional dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal.		
5. Anggaran Bidang Infrastruktur yang masih belum cukup untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur.		

Kebijakan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam sesuai dalam upaya unntuk mencapai sasaran yang ditetapkan RPJMD Kota Batam 2016 – 2021 adalah :

- 1) Melakukan pembangunan, pelebaran, rekonstruksi, dan pemeliharaan infrastruktur jalan.
- 2) Melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur jalan.
- 3) Melakukan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur drainase.
- 4) Melakukan normalisasi drainase.

Adapun turunan dari kebijakan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Btam diturunkan pada kebijakan – kebijakan pada bidang – bidang dan secretariat antara lain sebagai berikut :

Kebijakan Pembangunan Bidang Bina Marga ;

- 1) Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan dengan mengoptimalkan pembangunan, pelebaran, rekonstruksi, dan pemeliharaan infrastruktur jalan.

- 2) Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan intermoda dan sistem transportasi.
- 3) Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Perangkat Daerah Pemerintah Kota terkait pengelolaan prasarana jalan.
- 4) Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan kapasitas sumber daya aparatur dalam bidang infrastruktur bidang bina marga baik dari segi perencanaan dan pengawasan/*supervise* yaitu dengan peningkatan kualitas manajemen proyek dari suatu program dan kegiatan.
- 5) Penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi Prasarana Jalan dan Jembatan/Pelantar dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan dasar acuan perencanaan pengembangan dan pengelolaan Prasarana Jalan.

Kebijakan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air ;

- 1) Penanganan titik banjir di Kota Batam dengan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur drainase memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah.
- 2) Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah hinterland.
- 3) Penanganan terhadap abrasi pantai- dari terutama dilakukan pada daerah pesisir yang berpenduduk, pulau-pulau kecil serta pusat kegiatan ekonomi dan sosial.
- 4) Penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan dasar acuan perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.
- 5) Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Perangkat Daerah Pemerintah Kota terkait pengelolaan prasarana sumber daya air.
- 6) Peningkatan koordinasi terkait Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah hinterland.
- 7) Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan kapasitas sumber daya aparatur dalam bidang infrastruktur bidang Sumber Da baik dari segi perencanaan dan

pengawasan/*supervise* yaitu dengan peningkatan kualitas manajemen proyek dari suatu program dan kegiatan

Kebijakan Peningkatan Penerangan Jalan Umum

- 1) Membangun, memelihara dan merehabilitasi fasilitas Lampu Penerangan Jalan Umum.
- 2) Meningkatkan pelayanan Lampu Penerangan Jalan Umum sehingga dapat memberikan keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan.
- 3) Penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi Penerangan Jalan Umum dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan dasar acuan perencanaan pengembangan dan pengelolaan Penerangan Jalan Umum.
- 4) Peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk pelayanan bidang penerangan jalan umum.

Kebijakan Bidang Peralatan dan Pengujian

- 1) Pengadaan alat berat dan peralatan pengujian untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang bina marga dan sumber daya air.
- 2) Melakukan pemeliharaan terhadap peralatan yang tersedia untuk meningkatkan pelayanan.
- 3) Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia bidang peralatan dan pengujian.

Kebijakan Bidang Kesekretariatan,:

- 1) Menegakkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur melalui pengawasan dengan berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta penerapan *Good Governance*.
- 2) Menggunakan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif untuk pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang bina marga dan sumber daya air.
- 3) Peningkatan kapasitas, kualitas dan kinerja sumber daya Aparatur.
- 4) Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Renstra Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam 2021 – 2026 memiliki Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan target sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- a) Sub Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- b) Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai.
- c) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir.

2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase.

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan.
- b) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan.
- c) Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan.
- d) Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan.
- e) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase.

3. Program Program Penyelenggaraan Jalan.

Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
- b) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan.
- c) Sub Kegiatan pelebaran Jalan Menambah Lajur.
- d) Sub Kegiatan pelebaran Jalan Menambah Lajur.
- e) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan.

- f) Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan.
 - g) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan.
 - h) Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan / Pelantar.
4. Program Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
- Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
- a) Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi Pemeliharaan Rutin Drainase Kota Batam.
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi.
5. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).
- Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.
- a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.
- Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Pemeliharaan Lampu PJU wilayah hinterland Kota Batam.

Untuk program penunjang urusan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil utama dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam adalah :

- 1) Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap.
- 2) Persentase Titik Banjir Yang Ditangani (42 Titik Banjir Sebagai Baseline).

6.3 KELOMPOK SASARAN & PENDANAAN INDIKATIF

Adapun sumber pendanaan yang digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur di Kota Batam dan mewujudkan program dan kegiatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam adalah :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam (APBD Kota).
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi).
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pagu indikatif dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi								
						2021				2022				2023				2024				2025				2026			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)							
		1	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam				237,479,806,206		309,403,815,318	313,641,332,021		319,653,041,627	343,671,166,848	355,833,772,539	1,879,682,934,560						Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Batam								
Tujuan 1. Mewujudkan Infrastruktur Jalan Dalam Kondisi Mantap	Sasaran 1.	1.03	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																										
		1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%		39,413,256,837	100%	23,359,162,685	100%	23,359,162,685	100%	41,823,542,957	100%	45,551,823,653	100%	196,866,111,502												
		1.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan perangkat daerah yang terpenuhi		100%	11,858,430,974	100%	17,126,204,674	100%	17,658,274,054	100%	23,042,788,695	100%	24,347,045,564	100%	112,016,215,165												
		1.03.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		100%	60,430,000	-	-	100%	71,464,050	100%	75,037,253	100%	78,789,115	100%	368,448,989												
		1.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	639,839,800	100%	873,961,051	100%	1,278,631,350	100%	1,298,854,014	100%	1,464,816,063	100%	7,094,159,143					Kota Batam							
		1.03.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana		100%	595,700,000	100%	2,732,128,600	100%	1,211,148,125	100%	1,513,655,531	100%	2,659,338,308	100%	10,919,275,787												
		1.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	25,144,006,560	100%	1,923,593,360	100%	1,886,389,804	100%	1,929,654,295	100%	13,243,989,190	100%	60,058,322,219												
		1.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana		100%	1,114,849,503	100%	703,275,000	100%	1,253,255,302	100%	558,470,389	100%	1,333,841,587	100%	6,409,690,200												
		1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan yang Dilangani	18%	19 % (44.31 km)	138,457,888,556	35% (38.98 km)	192,371,862,516	51% (38.98 km)	184,318,027,563	67% (38.98 km)	184,598,241,313	84% (38.98 km)	188,248,466,991	100% (239.19 km)	1,072,722,013,676					Bidang Bina Marga	Kota Batam						
		1.03.10.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penjang jalan yang Dilangani		44.31 km	138,457,888,556	38.98 km	192,371,862,516	38.98 km	184,318,027,563	38.98 km	184,598,241,313	38.98 km	188,248,466,991	239.19 km	1,072,722,013,676												
		1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pengujian yang dilakukan	16%	17 %	571,783,560	33 %	399,419,400	50%	902,332,870	67%	488,049,514	83%	502,451,989	100%	3,381,611,922					Bidang Peralatan dan Pengujian	Kota Batam						
			1.03.11.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel yang di uji		10 sampel	571,783,560	10 sampel	399,419,400	10 sampel	902,332,870	10 sampel	488,049,514	10 sampel	502,451,989	10 sampel	3,381,611,922											
		2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLA)	Persentase lampu PUJ yang Dilangani	16%	16 %	25,614,408,890	33 %	48,958,202,330	49%	51,228,217,424	66%	54,195,122,227	83%	56,327,391,663	100%	295,463,338,436					Bidang Pengerangan Jalan Umum	Kota Batam						
		2.15.02.2.01	Kegiatan Pendapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase jumlah dokumen yang disusun		21 %	392,000,000	37%	588,000,000	53%	294,000,000	68%	294,000,000	84%	294,000,000	100%	2,156,000,000												
		2.15.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lampu PUJ yang dilangani		16028 tiang	25,222,408,890	16178 tiang	48,370,202,330	16328 tiang	50,934,217,424	16478 tiang	53,901,122,227	16628 tiang	56,033,391,663	16778 tiang	283,307,338,436												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggun g jawab	Lokasi			
						2021		2022		2023		2024		2025		2026						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Tujuan 2. Mewujudkan Sistem Drainase Yang Optimal Dalam Rangka Pengendalian / Penanganan Banjir	Sasaran 2. Meningkatnya Penanganan Titik Banjir	1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1. Persentase penanganan lokasi abrasi pantai 2. Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir	29%	29 %	10,478,052,180	43 %	12,539,495,968	57%	12,583,591,479	71%	13,662,465,888	86%	14,840,253,502	100%	14,825,911,404	100%	78,929,770,421	Bidang Sumber Daya Air	Kota Batam	
		1.03.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang abrasi pantai yang ditangani dan jumlah lokasi saluran yang dinormalisasikan	100%	100 %		100 m	12,539,495,968	100 m	12,583,591,479	100 m	13,662,465,888	33000 m	33000 m	100 m	14,825,911,404	700 m	78,929,770,421	Bidang Sumber Daya Air	Kota Batam	
						33000 m		33000 m		33000 m		33000 m		33000 m		33000 m		33000 m		Bidang Peralatan dan Pengujian	Kota Batam	
		1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang drainase yang ditangani	16%	16 % (61.268 m)	22,944,416,183	33 % (61.550 m)	31,775,672,419	49% (61.750 m)	41,250,000,000	66% (62.450 m)	43,350,000,000	83% (62.650 m)	45,450,000,000	100% (63.350 m)	47,550,000,000	100% (82.018 m)	232,320,088,602			
		1.03.06.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang ditangani		61268 m	22,944,416,183	61550 m	31,775,672,419	61750 m	41,250,000,000	62450 m	43,350,000,000	62650 m	45,450,000,000	63350 m	47,550,000,000	82018 m	232,320,088,602	Bidang Sumber Daya Air	Kota Batam	

BAB VII

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Adapun indikator kinerja Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam (2021– 2026) dapat terlihat pada tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

No.	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Administrasi Keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
II	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	86,97%	87,5%	88%	88,5%	89%	89,5 %	90%	90%
	Persentase panjang jalan yang Ditangani	18%	19 %	35 %	51%	67%	84%	100%	100%
	Panjang jalan yang Ditangani		44.31 km	38.98 km	38.98 km	38.98 km	38.98 km	38.98 km	239.19 km
	Persentase pengujian yang dilakukan	16%	17 %	33 %	50%	67%	83%	100%	100%
	Jumlah sampel yang di uji		10 sampel	10 sampel	10 sampel	10 sampel	10 sampel	10 sampel	60 sampel
	Persentase lampu PJU yang Ditangani	16%	16 %	33%	49%	66%	83%	100%	100%
	Persentase jumlah dokumen yang disusun		21 %	37%	53%	68%	84%	100%	100%
III	Jumlah lampu PJU yang ditangani		16028 tiang	16178 tiang	16328 tiang	16478 tiang	16628 tiang	16778 tiang	16778 tiang
	Persentase Titik Banjir Yang Ditangani (42 Titik Banjir Sebagai Baseline)	15 titik	12%	24%	36%	48%	73%	100%	100 %
	1. Persentase penanganan lokasi abrasi pantai	29%	29 %	43 %	57%	71%	86%	100%	100%
	2. persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
	Panjang abrasi pantai yang ditangani dan jumlah lokasi saluran yang dinormalisasikan		200 m 33000 m	100 m 33000 m	100 m 33000 m	100 m 33000 m	100 m 33000 m	100 m 33000 m	700 m 33000 m
	Persentase panjang drainase yang ditangani	16%	16 %	33 %	49%	66%	83%	100%	100%
	Panjang saluran drainase yang ditangani		61268 m	61550 m	61750 m	62450 m	62650 m	63350 m	82018 m

No.	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	PersentaseAdministrasi Keuangan perangkat daerah yang terpenuhi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
II	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	86,97%	87,5%	88%	88,5%	89%	89,5 %	90%	90%
	Persentase panjang jalan yang Ditangani	18%	19 %	35 %	51%	67%	84%	100%	100%
	Panjang jalan yang Ditangani		44.31 km	38.98 km	38.98 km	38.98 km	38.98 km	38.98 km	239.19 km
	Persentase pengujian yang dilakukan	16%	17 %	33 %	50%	67%	83%	100%	100%
	Jumlah sampel yang di uji		10 sampel	10 sampel	10 sampel	10 sampel	10 sampel	10 sampel	60 sampel
	Persentase lampu PJU yang Ditangani	16%	16 %	33%	49%	66%	83%	100%	100%
	Persentase jumlah dokumen yang disusun		21 %	37%	53%	68%	84%	100%	100%
	Jumlah lampu PJU yang ditangani		16028 tiang	16178 tiang	16328 tiang	16478 tiang	16628 tiang	16778 tiang	16778 tiang
III	Persentase Titik Banjir Yang Ditangani (42 Titik Banjir Sebagai Baseline)	15 titik	12%	24%	36%	48%	73%	100%	100 %
	1. Persentase penanganan lokasi abrasi pantai	29%	29 %	43 %	57%	71%	86%	100%	100%
	2. persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
	Panjang abrasi pantai yang ditangani dan jumlah lokasi saluran yang dinormalisasikan		200 m 33000 m	100 m 33000 m	100 m 33000 m	100 m 33000 m	100 m 33000 m	100 m 33000 m	700 m 33000 m
	Persentase panjang drainase yang ditangani	16%	16 %	33 %	49%	66%	83%	100%	100%
	Panjang saluran drainase yang ditangani		61268 m	61550 m	61750 m	62450 m	62650 m	63350 m	82018 m

Terakait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah DaerahPeraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2020 tentang terkait dengan urusan pelayanan dasar yang mejadi penilaian kinerja Pemerintah daerah sudah diakomodir Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dalam Indikator Kinerja Utama Dinas, indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas.

BAB VIII

PENUTUP

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam, maka Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam perlu merumuskan dan merencanakan program dan kegiatan bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam pada masa yang akan datang dengan lebih akurat dan terpadu.

Pelaksanaan program dan kegiatan belum dapat terlaksana dengan maksimal jika hanya mengandalkan sarana dan prasarana yang ada pada saat ini, dikarenakan belum optimalnya ketersediaan sumber daya manusia serta dana memadai untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Penerangan Jalan Umum, serta Peralatan dan Pengujian. Selain itu juga tidak meratanya jumlah sarana prasarana yang ada diakibatkan oleh letak geografis Kota Batam yang terdiri dari beberapa pulau terutama untuk daerah-daerah hinterland/pesisir yang belum terjangkau oleh Pemerintah.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air menyusun Rencana Strategis 2021 – 2026 agar dimasa yang akan datang program dan kegiatan pembangunan infrastruktur dapat merata di mainland dan hinterland meningkat pertumbuhan perekonomian dan sehingga peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Batam.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam mengambil kebijakan untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Disamping itu pula, Renstra ini dapat menjadi pedoman dalam mengevaluasi dan mengukur tingkat keberhasilan dari kinerja dinas, yang akan dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari tahun 2021 sampai dengan 2026.